

JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN ISLAM

Vol. 8, No. 1, April 2020

Dewan Editor:

Dr. M. Asmaldi Firman, Ak., MM, CA, BKP (Editor in Chief)

Dr. Sepky Mardian, SEI, MM, SAS (Managing Editor)

Dadang Romansyah, SE, Ak., MM, CA, SAS (Editor)

Sri Mulyati, SE, Ak., M.Ak, CA (Editor)

Reviewer:

Dr. Dodik Siswantoro, (Scopus ID: 56668704600) Fakultas Ekonomi,
Universitas Indonesia, Indonesia

Dr. Unggul Purwohedi, (Scopus ID: 57151305000) Universitas Negeri
Jakarta, Indonesia

Dr. Hidayatul Ihsan, (Scopus ID: 57191046992) Politeknik Negeri Padang,
Indonesia

Dr. Eng. Saiful Anwar, (Scopus ID: 47061150600) Institut Teknologi dan
Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Indonesia

Dr. Sigit Pramono, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Indonesia

Dr. Rini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
Indonesia

Dr. M. Nur A. Birton, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas
Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Dr. Rudy M. Harahap, Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia

Dr. Adli Adli, Universitas Mercubuana, Indonesia

Dr. Ainur Bayinah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Indonesia

Mulyaning Wulan, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Indonesia

Alamat Redaksi:

Kampus STEI SEBI | Jl. Raya Bojongsari, Depok, Jawa Barat 16517

Telp. 0251-8616655 | Fax. 0251-8604985

Email: jurnal@sebi.ac.id

<http://jurnal.sebi.ac.id/index.php/jaki>

DAFTAR ISI

Efisiensi di Bank Syariah: Studi Empiris pada Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia

Lili Puspita Sari

Hendri Tanjung **5-20**

Bagaimana Deposit Structure dan Ownership Concentration Memengaruhi Pengungkapan Islamic Corporate Governance?

Hasna Katsurayya

Tettet Fitrijanti

Fury Khristianty Fiiitriyah **21-38**

Apa Pertimbangan Masyarakat Berasuransi Syariah di Jabodetabek?

Tati Handayani

Fitri Yetty

Prima Dwi Priyatno **39-54**

Perbandingan Historical Cost dan Current Cost sebagai Dasar Penilaian Zakat Perbankan Syariah

Any Eliza

Rahmat Fajar Ramdani **55-70**

Apakah Kepercayaan Muwakif Ditentukan oleh Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Tunai dan Peran Nadzir ?

Agus Sulaeman

Ai Nur Bayinah

Roni Hidayat **71-86**

EFISIENSI DI BANK SYARIAH: STUDI EMPIRIS PADA UNIT USAHA SYARIAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH DI INDONESIA

Lili Puspita Sari

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450
Email: primadpriyatno@upnvi.ac.id

Hendri Tanjung

Universitas Ibn Khaldun Bogor
Jl. K.H. Sholeh Iskandar Raya Km. 2, Kedung Badak, Bogor 16161, Jawa Barat
Email: hendri.tanjung@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to evaluate Sharia Unit of Regional Development Bank (Bank Pembangunan Daerah) perform in Indonesia period 2012-2017. Considering the development of UUS in Indonesia including BPD, this research seeks to analyze the bank performs considering the BPD. BPD have important role to support the regional economy. One of the indicators used to know about bank perform is efficiency. The input variables used in this research are Third Party Fund, Labor Cost, Total Financing and Other Bank Placements. Using Data Envelopment Analysis (DEA) method, we found out that the efficiency level of UUS BPD in Indonesia is quite good with an average efficiency level above 85%. Meanwhile, by using tobit regression, we known that all variables used significantly influence the perform of UUS BPD efficiency level in Indonesia.

Keywords: *Efficiency, DEA, Tobit Regression*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat efisiensi Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia periode 2012-2017. Memperhatikan perkembangan UUS di Indonesia termasuk BPD, penelitian ini berusaha untuk melihat sejauh mana kinerja bank tersebut mengingat BPD memiliki peran penting dalam membantu ekonomi daerah. Salah satu indikator yang digunakan yaitu tingkat efisiensi menggunakan pendekatan dari sisi teknis. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Biaya Tenaga Kerja, Total Pembiayaan dan Penempatan Bank Lain dengan menggunakan sampel 12 Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia. Dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) didapatkan hasil bahwa tingkat efisiensi UUS BPD di Indonesia sudah cukup baik dengan tingkat rata-rata efisiensi diatas 85%. Sementara dengan menggunakan regresi tobit, diketahui semua variabel yang digunakan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tingkat efisiensi UUS BPD di Indonesia.

Kata kunci: Efisiensi, DEA, Regresi Tobit

1. PENDAHULUAN

Perbankan sebagai sebuah entitas industri keuangan, memiliki pengaruh yang besar berjalannya kegiatan perekonomian di suatu negara. Stabilitasnya kinerja perbankan menjadi hal penting yang harus dijaga dikarenakan memiliki pengaruh yang cukup fundamental. Pengaruh ini terlihat dari berjalannya kegiatan atau aktivitas ekonomi masyarakat agar tetap tumbuh dan terus berkembang. Di sisi lain, timbal balik yang didapatkan oleh bank yaitu keuntungan ataupun kerugian dikarenakan ini berkaitan dengan kegiatan bisnis.

Jika berbicara tentang bank, tentu tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana kepada masyarakat ataupun perusahaan. Salah satu instrumen informasi untuk mengetahui bagaimana kinerja suatu perusahaan termasuk bank dengan menggunakan laporan keuangan. Berdasarkan laporan keuangan, kita dapat mengetahui kinerja atau aktivitas perbankan dalam suatu rentang periode tertentu. Tujuan yang ingin dicapai yaitu apakah bank tersebut dapat memenuhi target-target yang diinginkan atau justru sebaliknya.

Dewasa ini, pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan pengukuran kinerja perbankan yaitu melalui perhitungan efisiensi (Putri & Lukviarman, 2008). Kinerja perbankan sangat identik bagaimana bank sebagai sebuah lembaga bisnis di industri keuangan dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya (Isik & Hassan, 2002). Hal ini dapat diartikan bahwa perbankan diharapkan dapat efisien dalam hal melakukan kegiatan bisnis akan tetapi tidak mengurangi keuntungan di masa mendatang. Kondisi ini sangat wajar mengingat bank merupakan entitas bisnis yang tentu memiliki tujuan untuk menghasilkan keuntungan seperti perusahaan pada umumnya.

Di Indonesia, eksistensi dunia perbankan sangat kuat. Pemerintah bersama Bank Sentral maupun otoritas terkait sangat aktif dalam memantau keadaan industri perbankan. Pencegahan terhadap resiko yang mungkin ditimbulkan menjadi alasan ketatnya pengawasan industri perbankan di Indonesia. Banyaknya bank yang hadir menjadi permasalahan klasik bagi industri perbankan itu sendiri. Kompetisi yang semakin ketat, tentu membuat setiap bank berlomba-lomba dalam menjaga eksistensinya agar tidak terjadi kebangkrutan di kemudian hari.

Bank syariah sedang mengalami masa periode tersebut. Ditengah persaingan ketat industri perbankan di Indonesia, bank syariah dihadapkan pada bagaimana menjaga eksistensinya agar mampu bertahan dan tidak terjadi crash. Ditengah lesunya ekonomi global, tentu berdampak terhadap secara tidak langsung terhadap industri perbankan termasuk bank syariah. Sebagai sebuah entitas bisnis, bank dihadapkan agar mendapatkan keuntungan yang tinggi dari dana-dana yang didapat dari para deposan. Tentunya ini terkait dengan keuntungan yang harus dibagikan oleh bank kepada para deposan sebagai bagian dari imbalan bagi para deposan yang bersedia menitipkan uangnya di bank.

Untuk mengatasi hal tersebut, efisiensi merupakan langkah riil yang dapat dilakukan suatu bank ditengah situasi ekonomi yang saat ini tidak menentu. Hal ini juga berlaku bagi bank agar dapat terus bersaing dengan bank konvensional. Mengingat pangsa pasar muslim terbesar di dunia, tentunya sangat disayangkan jika bank syariah tidak mampu memanfaatkan potensi besar tersebut. Jika bank syariah tidak mampu bertahan maka secara tidak langsung keberlangsungan industri perbankan syariah di Indonesia akan terancam hilang. Maka dari itu, efisiensi menjadi sesuatu hal mutlak yang harus dilakukan bank syariah jika ingin tetap menjaga eksistensinya dalam industri perbankan (Sufian, 2007),

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, tujuan dari efisiensi yaitu untuk mencapai tujuan yang diinginkan instansi yaitu keuntungan yang setinggi-tingginya dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Sebelum melakukan efisiensi, pihak bank tentu perlu mengetahui sejauh mana kegiatan bisnis perbankan tersebut berjalan.

Apakah sudah berada di koridor yang tepat atau terdapat kesalahan dalam implementasi di lapangan. Ketika terjadi kesalahan tentu akan berdampak pada menurunnya tingkat keuntungan yang didapatkan. Imbasnya bank akan mengalami penurunan terutama dari sisi aset. Bank syariah tentu menyadari hal tersebut, maka dari itu efisiensi menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan. Perkembangan perbankan syariah di tanah air belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Dengan pangsa pasar yang tidak beranjak dari 5% bahkan cenderung turun membuat para regulator harus bekerja ekstra lebih keras dalam membantu mempertahankan eksistensi bank yang berlandaskan pada syariah tersebut.

Tentu selain dukungan dari regulator, pihak perbankan syariah sendiri harus melakukan evaluasi secara khususnya mengenai kinerja dari sisi bisnis. Inilah kenapa efisiensi mutlak diperlukan karena sebagai tolak ukur sejauh mana perkembangan perbankan syariah terutama dari segi bisnis. Setidaknya masyarakat mendapatkan gambaran mengenai bagaimana progress dari perkembangan perbankan syariah khususnya dari sisi bisnis mengingat para nasabah tentu selain agama, motivasi menabung di bank syariah yaitu pembagian profit.

Dewasa ini perhatian banyak orang banyak tertuju kepada perkembangan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Ini dikarenakan dua jenis bank ini merupakan motor utama dalam mendukung untuk meningkatkan market share perbankan syariah. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk melihat perkembangan dari UUS mengingat institusi keuangan ini masih memiliki dukungan dari bank induk yaitu bank konvensional. Tentu dengan asumsi awal bahwa UUS bisa berkembang lebih baik karena mendapat dukungan dari bank induk baik dari segi modal maupun layanan kantor. Untuk membuktikan asumsi tersebut, maka peneliti akan mengawali dengan memberikan data mengenai bagaimana pergerakan total aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Total aset dan DPK bisa menjadi indikator bagaimana laju pertumbuhan sebuah institusi keuangan. Dalam hal ini perkembangan dua indikator tersebut juga dapat memberikan gambaran bagi kita bagaimana

keadaan perkembangan UUS di Indonesia. Selain itu ini juga sebagai bagian dari bahan evaluasi bagaimana sebenarnya kinerja institusi tersebut serta perbaikan apa yang harus segera dilakukan agar ke depannya kinerjanya semakin baik lagi.

Tabel 1. Total Aset dan DPK UUS Per Maret 2018 (Rp Miliar)

| | Sep'2017 | Okt'2017 | Nov'2017 | Des'2017 | Jan'2018 | Feb'2018 | Mar'2018 |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Total Aset | 119.148 | 122.445 | 123.447 | 136.154 | 128.789 | 128.870 | 133.934 |
| DPK | 86.225 | 89.167 | 89.959 | 96.495 | 95.866 | 92.685 | 95.089 |

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK Per Oktober 2018 (Diolah)

Dari data terbaru yang didapatkan, terlihat total aset dari UUS dalam rentang waktu September 2017 hingga Maret 2018 mengalami fluktuasi. Titik tertinggi dari total aset yang didapat berada di bulan Desember 2017 yaitu sebesar Rp 136 Triliun. Sementara dari sisi total DPK, pergerakannya cenderung naik, hanya terjadi penurunan selama Desember 2017-Februari 2018 namun Maret 2018 kembali naik. Berdasarkan Data tersebut dapat identifikasi bahwa UUS di Indonesia perlu melakukan akselerasi dalam hal peningkatan kinerja. Artinya bahwa melihat adanya fluktuasi baik dari sisi aset maupun DPK dapat dijadikan dasar untuk melihat sejauh mana sebenarnya UUS menjalankan konsep efisiensi dalam hal menjalankan kegiatan mereka.

Di sisi lain, kita ketahui bank UUS di Indonesia yang dimiliki induk yang berasal dari Bank Umum (milik pemerintah dan swasta) maupun Bank Pembangunan Daerah (BPD). Kedua insitusi tersebut tentu memiliki perbedaan dari segi modal maupun jaringan kantor. Pada konteks BPD, dukungan modal dan jaringan masih terbatas, sehingga berpengaruh terhadap kinerja yang kurang optimal misalnya dari segi efisiensi (Endri & Abidin, 2009).

Untuk itu, pengukuran efisiensi UUS di bawah BPD juga perlu dilakukan sebagai temuan informasi bagaimana kinerja unit tersebut saat ini. Sebagai bagian dari ekosistem industri perbankan syariah di Indonesia, informasi kinerja UUS BPD penting untuk mengetahui sejauh mana unit tersebut bekerja secara optimal dalam mendukung pengembangan keuangan syariah.

2. TELAAH TEORITIS

Efisiensi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kinerja perbankan. Dengan tingkat efisiensi yang semakin tinggi mengindikasikan bank tersebut memiliki kinerja yang baik, begitu pun sebaliknya. Dalam melakukan pengukuran tersebut, ada tiga pendekatan umum yang biasa digunakan yaitu teknis, biaya dan profit. Penelitian ini lebih berfokus dalam meneliti tingkat efisiensi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah dengan pendekatan teknis. Peneliti melakukan review beberapa

jurnal yang meneliti tentang efisiensi di perbankan pada umumnya, dan BPD pada khususnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Yudistira (2004) meneliti tentang efisiensi perbankan syariah dengan menggunakan pendekatan teknis. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan DEA dengan populasi yang digunakan sebanyak 18 bank syariah dari 12 negara berbasis mayoritas muslim termasuk Indonesia. Periode yang digunakan pada penelitian dari tahun 1997 hingga tahun 2000. Sementara itu untuk pemilihan variabel input yang digunakan pada penelitian ini yaitu biaya tenaga kerja, DPK dan total aset. Sementara untuk variabel output yang digunakan yaitu total pembiayaan, pendapatan lainnya serta aset lancar. Hasil penelitian memperlihatkan tingkat efisiensi bank syariah di luar timur tengah periode 1997 hingga 1999 lebih baik dibandingkan bank syariah yang berada di timur tengah. Sementara untuk tahun 2000 tingkat efisiensi bank syariah di timur tengah jauh lebih baik dibandingkan bank syariah yang berada di luar timur tengah.

Ascarya dan Yumanita (2006) meneliti tentang efisiensi bank syariah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan dari sisi teknis. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu DEA dengan periode penelitian yang digunakan yaitu dari tahun 2002 hingga 2008. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu 4 BUS dan 6 UUS sehingga secara keseluruhan terdapat 10 sampel. Untuk variabel input yang digunakan pada penelitian ini yaitu total aset, DPK dan biaya tenaga kerja. Di sisi lain, untuk variabel output yang digunakan yaitu total pembiayaan, pendapatan lainnya dan aktiva lancar. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dengan pendekatan efisiensi teknis, skor efisiensi yang didapatkan oleh bank syariah cukup baik dimana ada beberapa BUS yang mampu mencapai skala efisiensi hingga mencapai 100%. Hal ini memperlihatkan bank syariah di Indonesia memiliki performa yang cukup baik.

Hartono, Djohar, & Daryanto (2008) melakukan analisis efisiensi terhadap Bank Pembiayaan Rakyat di daerah Jabodetabek periode 2005-2007 dengan menggunakan pendekatan teknis. Dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) serta variabel input terdiri dari Dana Pihak Ketiga (DPK), Biaya Tenaga Kerja dan Aktiva Tetap serta Output yang terdiri dari Total Pembiayaan dan Pendapatan lainnya. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa BPR belum efisien dengan nilai rata-rata efisiensi di kisaran 50-60%.

Abidin dan Endri (2009) mengkaji tingkat efisiensi di Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia periode 2006-2007 dengan pendekatan teknis menggunakan metode DEA. Variabel input yang digunakan DPK, biaya tenaga kerja dan aktiva tetap serta output yang digunakan yaitu total pembiayaan dan total pendapatan. Hasil penelitian memperlihatkan selama periode tersebut BPD yang berada di pulau Jawa memiliki tingkat efisiensi paling baik dengan rata-rata tingkat efisiensi diatas 85%. Diikuti BPD yang berada di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan terakhir Papua.

Fathony (2013) menjelaskan efisiensi perbankan nasional berdasarkan ukuran bank dengan metode DEA. Populasi pada penelitian ini terdiri dari 115 Bank Umum Konvensional yang tercatat di Bank Indonesia. Variabel Input yang dipergunakan yaitu : DPK, Biaya Tenaga Kerja dan Aktiva Tetap. Sementara Variabel Output yang digunakan yaitu Total Kredit dan Total Pendapatan. Skala ekonomi memberikan keuntungan bagi bank berupa biaya rata-rata per-unit yang rendah dengan jumlah pinjaman yang semakin besar. Bagi bank yang tingkat efisiensinya belum mencapai optimal dapat melakukan potensi perbaikan (potential improvement) dengan meningkatkan output dan/atau menurunkan input dengan mengacu (benchmarking) pada bank yang efisien.

Penelitian yang dilakukan Firdaus dan Hosen (2013) meneliti tentang efisiensi bank syariah di Indonesia dengan menggunakan efisiensi teknis. Metode yang digunakan pada penelitian yaitu DEA dan populasi yang dipakai yaitu 10 BUS yang beroperasi di Indonesia dengan periode penelitian 2010 hingga 2012. Untuk variabel input yang digunakan pada penelitian ini yaitu total aset, biaya tenaga kerja dan DPK. Sementara di sisi lain, variabel output yang digunakan pada penelitian ini yaitu total pembiayaan dan pendapatan operasional. Peneliti juga menggunakan regresi tobit dalam menganalisis variabel-variabel mana yang berpengaruh terhadap tingkat efisiensi bank syariah.

Hasil penelitian memperlihatkan rata-rata efisiensi BUS di Indonesia cukup baik dengan sampel bank yang mampu meraih skor bagus yaitu Bank Muamalat. Sementara bank-bank syariah memiliki tingkat skor efisiensi teknis yang cenderung bergerak secara fluktuatif. Dengan menggunakan regresi tobit, diketahui bahwa variabel-variabel total aset dan DPK berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat efisiensi teknis bank. Sementara variabel total pembiayaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat efisiensi bank.

Tuzuhroh (2014) meneliti tentang efisiensi Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Periode 2010-2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu DEA, dimana populasi sampel yang ditentukan terdiri dari 11 BUS yang beroperasi di Indonesia. Variabel input yang digunakan terdiri dari simpanan dan beban operasional lainnya. Sementara untuk variabel output terdiri dari pembiayaan (O1) dan pendapatan operasional lainnya (O2). Berdasarkan hasil analisis, didapatkan hasil jika sebagian besar bank syariah selama periode 2010 sampai dengan tahun 2012 belum efisien. Penyebab terjadinya inefisiensi pada BUS-BUS tersebut bersumber dari kurangnya optimalnya bank dalam mengoptimalkan sumber pendanaan menjadi output (pembiayaan dan pendapatan operasional lainnya).

Gishkori dan Ullah (2013) meneliti tentang perbandingan efisiensi bank konvensional dan bank syariah di Pakistan periode 2007 hingga 2011 dengan pendekatan efisiensi teknis. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu DEA. Sampel bank yang digunakan sebanyak 34 bank. Variabel input yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari total aset yang digunakan, DPK dan jumlah tenaga kerja. Sementara variabel output yang digunakan pada penelitian ini yaitu penempatan pada bank lain dan total

pembiayaan. Peneliti juga menggunakan regresi tobit dalam mengidentifikasi variabel mana yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat efisiensi teknis bank.

Hasil efisiensi memperlihatkan bahwa rata-rata efisiensi bank di Pakistan baik konvensional maupun syariah masih cukup rendah. Nilai efisiensi terbesar justru bank asing yang beroperasi di Pakistan seperti Citibank dengan skor sebesar 83,9%. Sementara bank lokal hanya memiliki skor efisiensi rata-rata dibawah 50%. Berdasarkan penggunaan regresi tobit, diketahui bahwa penempatan pada bank lain, DPK, total pembiayaan, total aset yang digunakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat efisiensi teknis bank. Sementara variabel jumlah tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat efisiensi bank.

Cahaya (2015) tentang Efisiensi Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2010 – 2012 dengan menggunakan metode DEA. Populasi Penelitian yang ditentukan pada penelitian ini terfokus pada seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang berada di Indonesia yaitu 11 BUS. variabel Input yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu : DPK dan Biaya Tenaga Kerja. Sementara variabel output yang digunakan pada penelitian ini yaitu Total Pembiayaan dan Pendapatan Operasional.

Berdasarkan dari analisis yang telah dilakukan dari kinerja 11 bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia pada tahun 2010- 2012 terdapat 4 BUS yang belum efisien dan 7 Bank Umum Syariah lainnya telah mencapai tingkat efisiensi. Dapat disimpulkan mayoritas Bank Umum Syariah di Indonesia telah efisien. Beberapa hal yang menyebabkan masih adanya bank yang belum efisien diantaranya kinerja bank yang tidak optimal dalam mengolah sumber daya yaitu dana pihak ketiga menjadi pembiayaan. Hal ini tercermin dari realisasi output pembiayaan dan pendapatan operasional yang rendah sehingga berpengaruh terhadap pengukuran skor efisiensi yang rendah.

Edward dan Anwar (2015) meneliti tentang Efisiensi Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2013. Populasi Penelitian yang ditentukan pada penelitian ini yaitu 8 Bank yang termasuk Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi di Indonesia. Pemilihan BUS didasarkan pada ketersediaan data yang dapat memudahkan bagi peneliti. Sampel dari BUS- BUS yang digunakan yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI syariah, Bank BRI Syariah, Bank BJB Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah dan Bank Muamalat Indonesia.

Variabel Input yang dipergunakan yaitu : DPK dan Modal disetor. Sementara Variabel Output yang digunakan yaitu Total Pembiayaan yang dilakukan mencakup pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, Ijarah dan Qardh. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata efisiensi teknis tertinggi selama tahun 2010 sampai dengan 2013 diperoleh oleh Bank Syariah Mandiri sebesar 99,38%. Di sisi lain nilai efisiensi teknis yang paling terendah didapatkan oleh BRI Syariah dengan nilai sekitar 51,90% Sementara dengan menggunakan pendekatan efisiensi biaya, selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 rata-rata nilai efisiensi tertinggi masih didapatkan oleh

Bank Mandiri Syariah dengan nilai sebesar 79,24%. Sementara nilai efisiensi terendah kembali didapatkan oleh BRI Syariah dengan nilai 39,11%.

Hasil dari penelitian juga menjelaskan bahwa skala usaha secara signifikan berpengaruh positif dengan tingkat efisiensi biaya bank-bank syariah. Ini berarti bahwa semakin besar skala usaha bank syariah maka semakin efisien bank syariah tersebut. Di sisi lain hasil penelitian yang didapatkan peneliti sesuai dengan penelitian Rangan (1998). Model ini yaitu variable skala usaha hanya mampu menjelaskan sebesar 18,5% dari tingkat efisiensi biaya sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lainnya.

Faisol, Zainuri dan Yulianti (2015) tentang efisiensi perbankan syariah di Indonesia pasca krisis Finansial Global 2008 menggunakan metode DEA. Populasi Penelitian yang ditentukan pada penelitian ini yaitu 11 Bank Umum Syariah dan 12 Unit Usaha Syariah (termasuk Bank Pembangunan Daerah) dengan periode penelitian 2010-2014. Variabel input yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu : Biaya Tenaga Kerja, Aset Tetap dan Total Deposito. Di sisi lain, variabel output yang digunakan pada penelitian ini yaitu Total Pembiayaan, Aset Lancar, Pendapatan Lainnya.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa hanya ada satu bank yang mencapai efisiensi 100% secara konsisten mulai tahun 2010-2014, yaitu Bank Maybank Syariah, dan terdapat satu bank yang tidak pernah mencapai efisiensi sempurna yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah, sementara tingkat efisiensi pada sembilan bank yang lain mengalami fluktuasi. Fenomena menarik juga terjadi pada UUS, terdapat satu bank yang mencapai efisiensi sempurna secara konsisten yaitu Bank Permata, dan dua bank yang selalu inefisien yaitu Bank Danamon dan BPD Riau, sementara gejala efisiensi juga dialami pada sembilan UUS yang lain. Nilai efisiensi yang ditemukan juga menunjukkan bahwa secara umum perbankan syariah di Indonesia tidak terpengaruh imbas krisis supprime mortgage 2008.

Penelitian lain dilakukan oleh Puspita (2017) meneliti efisiensi BPD syariah di Indonesia pada periode 2012-2016. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu DEA. Sementara pengukuran efisiensi yang digunakan yaitu dengan pendekatan dari sisi teknis. Variabel input yang digunakan yaitu ukuran bank, Return on Assets (RoA), Net Performing Loan (NPF) dengan output yang digunakan total pembiayaan dan inflasi. Selain menggunakan DEA, peneliti juga menggunakan regresi tobit dalam meneliti faktor-faktor mana yang mempengaruhi tingkat efisiensi BPD tersebut.

Pada penelitian tersebut didapatkan hasil, rata-rata efisiensi BPD Syariah berada di kisaran 80%. Dari penggunaan regresi Tobit, diketahui bahwa variabel ukuran bank, RoA, Total pembiayaan berpengaruh terhadap tingkat efisiensi BPD Syariah di Indonesia. Sementara variabel tingkat kredit macet dan inflasi tidak berpengaruh signifikan.

Penelitian yang mirip juga dilakukan oleh Cahyono dan Rani (2017) yaitu tentang UUS BPD di pulau Sumatera. Namun perbedaannya terletak pada penggunaan variabel input yang digunakan yaitu beban operasional, beban tenaga kerja, beban lainnya dan beban dana usaha, Sementara output yang digunakan yaitu tingkat pendapatan. Hasil pengukuran efisiensi menunjukkan, mayoritas kinerja UUS cukup baik yaitu berada di atas 90%.

Berdasarkan review di atas, penelitian yang dilakukan Puspita (2017) serta Cahyono dan Rani (2017) memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai peneliti. Hasil penelitian tersebut menjadi rujukan untuk melakukan pengukuran lanjutan dengan menggunakan periode data yang lebih terbaru guna mengetahui apakah kinerja UUS BPD di Indonesia masih cukup baik atau sebaliknya.

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, pengukuran efisiensi akan menggunakan pendekatan efisiensi teknis dengan alat analisis yang digunakan yaitu Data Envelopment Analysis (DEA). Populasi yang digunakan yaitu 18 UUS BPD di Indonesia. Namun, adanya keterbatasan data maka peneliti hanya menggunakan 12 UUS BPD. Berikut sampel yang peneliti gunakan:

Tabel 2. Sampel Penelitian

| No. | Sampel | Daerah Asal |
|-----|---|---------------------|
| 1. | UUS Bank DKI | DKI Jakarta |
| 2. | UUD Bank BPD Yogyakarta | Yogyakarta |
| 3. | UUS Bank BPD Jawa Tengah | Jawa Tengah |
| 4. | UUS Bank BPD Jawa Timur | Jawa Timur |
| 5. | UUS Bank BPD Sumatera Utara | Sumatera Utara |
| 6. | UUS Bank BPD Sumatera Barat | Sumatera Barat |
| 7. | UUS Bank BPD Riau | Riau |
| 8. | UUS Bank BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung | Sumatera Selatan |
| 9. | UUS Bank BPD Kalimantan Selatan | Kalimantan Selatan |
| 10. | UUS Bank BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat | Sulawesi Selatan |
| 11. | UUS Bank BPD Nusa Tenggara Barat. | Nusa Tenggara Barat |
| 12. | UUS Bank Jambi | Jambi |

Setelah menentukan sampel, maka langkah selanjutnya peneliti menentukan variabel input dan output yang digunakan. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Ascarya dan Yumanita (2006), Abidin dan Endri (2009), Firdaus dan Hosen (2013), Rosman, Wahab, & Zainol (2014), Puspita (2017) maka variabel yang digunakan pada Tabel 3,

Periode data yang digunakan pada penelitian bersifat bulanan dari tahun 2012 hingga 2017 bersumber dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh Bank serta laporan bulanan yang diterbitkan di situs Bank Indonesia (BI). Penggunaan periode data tersebut, dengan mempertimbangkan

ketersediaan data serta historis waktu yang cukup panjang sehingga hasil pengolahan data akan lebih valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

Tabel 3. Variabel Input dan Output

| No | Variabel | Kategori |
|----|-------------------------|----------|
| 1. | DPK | Input |
| 2. | Biaya Tenaga Kerja | Input |
| 3. | Total Pembiayaan | Output |
| 4. | Penempatan di Bank Lain | Output |

Pengukuran efisiensi didukung dengan metode regresi tersebut membantu peneliti untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh terhadap efisiensi suatu UUS. Jenis regresi yang digunakan adalah regresi tobit. Alasannya, dependen yang digunakan peneliti memiliki nilai terbatas, dimana skor efisiensi terdiri dari 0-1. Sementara untuk variabel independen, peneliti menggunakan variabel total simpanan, biaya tenaga kerja, total pembiayaan dan penempatan bank lain. Secara keseluruhan, hal tersebut peneliti gambarkan dalam bentuk model sebagai berikut :

$$E_{UUS} = a + b_1 \log TS + b_2 \log BTK + b_3 \log TP + b_4 \log PBL + \varepsilon_n$$

Dimana E adalah skor efisiensi dari UUS, TS adalah Total Simpanan (DPK), BTK adalah Biaya Tenaga Kerja, TP adalah Total Pembiayaan, dan PBL adalah Penempatan di Bank Lain.

Selain itu, peneliti juga menyusun hipotesa awal sebagai landasan dalam menilai signifikansi suatu variabel independen terhadap variabel dependen. Rumusan hipotesa yang digunakan yaitu :

Hipotesa Nol (H_0) : jika nilai probabilitas (p) lebih kecil dari nilai alpha (α) maka variabel independent berpengaruh signifikan terhadap efisiensi UUS BPD di Indonesia.

Hipotesa Alternatif (H_a) : jika nilai probabilitas (p) lebih besar dari nilai alpha (α) maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi UUS BPD di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL EFISIENSI

Tabel 4 memperlihatkan tingkat efisiensi rata-rata UUS tertinggi terjadi pada tahun 2016, dimana skor efisiensi mencapai 97,6 persen. Sementara skor terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 85,2 persen.

Tingginya skor efisiensi pada tahun 2016, salah satunya didorong oleh banyak UUS yang mampu mencapai skor efisiensi sempurna yaitu 100

persen. Hanya UUS Bank Jambi yang tidak meraih skor sempurna, karena hanya mendapat nilai 78,3 persen. Di sisi lain, rendahnya rata-rata skor efisiensi di tahun 2013 terjadi akibat hanya beberapa UUS yang mendapat skor efisiensi sempurna. Bahkan pada periode ini, terdapat UUS yang mendapatkan nilai skor efisiensi hanya sebesar 28,2 persen.

Tabel 4. Hasil Pengolahan Efisiensi UUS (persen)

| No | Nama | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | BPD Jogja | 83,3 | 100 | 96,8 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | BPD Kaltim | 100 | 99,9 | 100 | 83,6 | 100 | 83,5 |
| 3 | Bank DKI | 100 | 100 | 80,1 | 95 | 100 | 100 |
| 4 | Bank Jambi | 100 | 28,2 | 100 | 100 | 78,3 | 96,7 |
| 5 | Bank Sulselbar | 100 | 82,3 | 67,6 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Bank Riau Kepri | 100 | 94,2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Bank Sumbar | 74,0 | 81,5 | 88,3 | 99,5 | 100 | 100 |
| 8 | Bank Jateng | 100 | 92,2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Bank Jatim | 85,2 | 100 | 100 | 93,3 | 100 | 100 |
| 10 | Bank Kalsel | 100 | 92,7 | 98,7 | 100 | 100 | 88,5 |
| 11 | Bank Sumsel Babel | 100 | 72 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Bank Sumut | 88,4 | 72,1 | 86,2 | 100 | 100 | 100 |
| | Mean | 94,1 | 85,2 | 93,1 | 96,8 | 97,6 | 97 |

Sumber : Data Diolah 2019

Jika kita lihat di periode lain seperti tahun 2012, skor efisiensi rata-rata mencapai 94,1 persen. Pencapaian ini didukung karena hanya empat UUS yang tidak memiliki skor efisiensi sempurna. Ini juga terlihat pada periode tahun lainnya seperti 2015 dan 2017. Sementara pada tahun 2014, skor efisiensi rata-rata masih cukup tinggi. Namun, disebabkan salah satu UUS yaitu UUS Bank Sumbar meraih skor sebesar 67,6 persen, maka berdampak terhadap pencapaian yang tidak setinggi pada tahun 2012, 2015 atau 2017.

Untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana yang berpengaruh terhadap efisiensi suatu UUS, maka peneliti akan menggunakan metode Regresi Tobit. Hasil ini akan membantu peneliti dalam menganalisis hal yang berpengaruh signifikan terhadap nilai efisiensi.

4.2 HASIL REGRESI TOBIT

Untuk mengidentifikasi variabel apa yang dapat mempengaruhi tingkat efisiensi UUS BPD di Indonesia, maka peneliti akan menggunakan metode regresi tobit. Elaborasi faktor-faktor yang mungkin berpengaruh terhadap skor efisiensi suatu UUS, peneliti lakukan dengan menggunakan pendekatan regresi tobit. Hasil pengolahan data akan membantu peneliti dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang signifikan maupun tidak sehingga membantu analisis penyebab pergerakan efisiensi UUS di Indonesia.

Tabel 5. Hasil Regresi Tobit

| | DPK | BTK | TP | PBL |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| UUS BPD di Indonesia | 0.00* | 0.43* | 0.00* | 0.13* |

$\alpha = 0,05$, * = Signifikan

Sumber : Data Diolah (2019)

Dalam mengidentifikasi variabel-variabel mana yang mempengaruhi, maka peneliti menggunakan indikator nilai probabilitas dari masing-masing variabel. yang akan dibandingkan dengan nilai alpha yang digunakan yaitu 5%. Berdasarkan hasil probabilitas yang terdapat dalam table 4.2, diketahui bahwa hanya DPK dan total pembiayaan yang signifikan terhadap tingkat efisiensi UUS BPD di Indonesia. Sementara variabel biaya tenaga kerja dan penempatan pada bank lain tidak berpengaruh signifikan.

Pengaruh signifikan variabel DPK terhadap skor efisiensi sejalan dengan temuan Gishkori dan Ullah (2013). Sementara pengaruh signifikan variabel total pembiayaan terhadap efisiensi dengan hasil penelitian Puspita (2017). Pengaruh dari masing-masing variabel terhadap kinerja bank tergambar dari proses bisnis yang dijalankan. Saat bank melakukan penghimpunan dana dari masyarakat lalu disalurkan ke perbankan, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap kinerja bank misalnya keuntungan yang didapatkan atau peningkatan total aset.

Jika kita mengambil contoh UUS BPD yang memiliki nilai efisiensi rendah seperti Bank Jambi di tahun 2013. Penyebab utamanya adalah tingginya DPK yang dikumpulkan tidak mampu dikonversikan menjadi jumlah pembiayaan yang cukup besar. Sementara jika lihat UUS BPD yang mampu mendapatkan skor efisiensi hingga 100%, realisasi pembiayaan yang disalurkan cukup besar sejalan dengan penghimpunan DPK yang tinggi. Maka, bank perlu menyeimbangkan antara penerimaan sumber pendanaan dengan total penyaluran pembiayaan. Jika bank memiliki DPK yang tinggi namun tidak maksimal disalurkan dalam bentuk pembiayaan, secara pendekatan efisiensi akan mendapatkan hasil yang buruk dan begitu juga sebaliknya.

Oleh sebab itu, para manajemen bank perlu lebih giat dalam mengelola sumber daya yang ada untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Di sisi lain, target penyaluran pembiayaan yang ditetapkan juga perlu disertai dengan perencanaan segmen yang ingin dioptimalkan dan

mitigasi terhadap resiko pembiayaan. Hal ini untuk mencegah tingkat pembiayaan macet bank meningkat tajam akibat tingginya nilai pembiayaan yang disalurkan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa beberapa UUS BPD di Indonesia memiliki skor efisiensi yang cukup baik. Di sisi lain, masih terdapat UUS yang memiliki skor efisiensi yang kurang baik. Hasil identifikasi dengan menggunakan metode regresi Tobit, variabel yang berpengaruh signifikan terhadap skor efisiensi adalah DPK dan Total Pembiayaan. Hal ini tergambar pada beberapa sampel UUS yang mendapat skor efisiensi sempurna, karena mampu mengkonversi DPK menjadi pembiayaan secara optimal.

Beberapa saran yang peneliti usulkan dalam penelitian ini untuk meningkatkan efisiensi dari UUS di Indonesia, Pertama, memaksimalkan prinsip GCG untuk mendorong kinerja dari UUS. Pada konteks ini, peran regulator diantaranya OJK cukup penting. Sebagai otoritas perbankan dari sisi regulasi, OJK dapat lebih menyempurnakan POJK Nomor 8/POJK.03/2014 agar tidak hanya membahas dari sisi kesehatan bank, namun juga perbaikan internal lainnya yang harus dilakukan bank syariah. Selain itu, OJK perlu sering melakukan pertemuan rutin dengan para banker UUS BPD untuk mengetahui bagaimana sebenarnya masalah di lapangan, apa saja hambatan yang mereka temui sehingga bisa dicarikan jalan keluar yang sesuai dan mampu membantu peningkatan kinerja dari UUS itu sendiri.

Kedua, Optimalisasi peran OJK di daerah dalam melakukan kontrol terhadap UUS BPD di Indonesia. Kurangnya monitoring bisa jadi salah satu penyebab kinerja suatu UUS terganggu sehingga ikut berpengaruh terhadap pencapaian tingkat efisiensi yang didapatkan. Oleh karena itu, dengan keberadaan kantor wilayah OJK di daerah seharusnya lebih dapat melakukan monitoring secara intens sehingga jika ada gangguan yang dihadapi oleh UUS BPD di daerah dapat segera terselesaikan dan tidak mengganggu perkembangan dari UUS itu sendiri. OJK bisa memanfaatkan era teknologi untuk memantau kinerja suatu UUS BPD di daerah. Misalnya melalui pemantauan data perbankan untuk mengetahui bagaimana kinerja bank tersebut apakah ada potensi kredit macet atau terjadi perlambatan ekonomi di daerah tersebut yang ditandai menurunnya total pembiayaan.

Ketiga, OJK dapat mempertimbangkan aturan yang memperbolehkan merger antar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan UUS BPD atau merger antar sesama UUS BPD di Indonesia untuk menciptakan industri UUS BPD yang lebih kuat dan siap menghadapi era persaingan perbankan yang ketat. Saat ini, banyak stakeholder yang menyuarakan agar UUS BPD melakukan merger agar mampu bersaing baik dari sisi permodalan maupun market share dengan perbankan nasional utamanya bank BUMN seperti Bank Mandiri, Bank BNI hingga Bank BRI. Bank-bank tersebut saat ini telah menjangkau hingga pelosok-pelosok daerah sehingga membuat market share dari BPD pun ikut berkurang. Dengan adanya keterbatasan dana dan sumber

daya manusia serta teknologi tentu akan menyulitkan UUS BPD untuk mengikuti persaingan tersebut. Salah satu jalan yang bisa dilakukan melalui melakukan merger antar BPRS dan UUS BPD atau merger antar sesama UUS BPD di Indonesia. Situasi ini tentu memperkuat tidak hanya dari sisi permodalan maupun sumber daya manusia namun juga dari market share yang ada di lapangan.

Keempat, perlu adanya dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan kinerja bisnis UUS BPD di Indonesia misalnya bantuan anggaran daerah baik misalnya melalui skema pembelian saham. Hal ini sangat berharga bagi para UUS BPD untuk menunjang bisnis mereka lebih baik lagi dan ikut meningkat keuntungan yang didapat. Bantuan lain yang dapat diberikan misalnya melalui himbauan penerbitan obligasi oleh para UUS BPD. Penerbitan obligasi dimaksudkan untuk membantu suatu perusahaan mendapat modal tambahan guna melakukan ekspansi usaha yang lebih besar lagi. Saat ini penerbitan obligasi oleh UUS BPD masih jarang dilakukan sehingga cara ini mungkin bisa menjadi alternatif ketika UUS BPD mengalami masalah dari sisi permodalan. Pemerintah dapat membantu penerbitan obligasi tersebut baik sebagai *Special Purpose Vehicle (SPV)*. SPV merupakan badan hukum yang bertugas untuk menerbitkan obligasi termasuk obligasi syariah. Jika ada UUS yang hendak menambah permodalan melalui penerbitan obligasi syariah/sukuk, maka pemerintah dapat berkontribusi dengan membantu kelancaran penjualan tersebut sebagai SPV.

Kelima, perlunya menggandeng UUS BPD dalam menyalurkan program-program bantuan pemerintah. Sebagai contoh program KUR. Program ini sudah lama ada di Indonesia, namun pemerintah masih menggandeng bank-bank besar terutama BUMN. Padahal keberadaan BPD termasuk UUS seharusnya mampu dimaksimalkan dalam melakukan penyaluran tersebut. Keberadaan mereka di daerah tentu mempermudah dalam menjangkau calon nasabah yang tepat sasaran sehingga program pemerintah berhasil. Di sisi lain, hal ini juga ikut membantu UUS BPD memperluas market share mereka hingga ke pelosok-pelosok daerah sehingga mereka dapat meningkatkan total output yang disalurkan yaitu total pembiayaan. Meningkatnya total pembiayaan tentu dapat membantu peningkatan tingkat efisiensi teknis bank.

Keenam, mendorong UUS BPD untuk melakukan spin off dari induk dan melakukan listing saham di pasar saham. Sudah saat UUS BPD tidak selalu bergantung kepada induk dalam hal permodalan. Jalan alternatif yang dapat dilakukan dengan melakukan listing saham guna mendapatkan dana tambahan dari investor. Saat ini pasar saham Indonesia sedang memiliki angin cerah yang ditandai indeks yang telah menembus di atas 6.000. Kondisi yang sedang baik ini perlu dimanfaatkan oleh UUS BPD dengan melakukan listing saham sehingga mudah menemukan investor. UUS BPD pun tidak terlalu direpotkan dengan masalah administrasi, hanya saja para UUS tersebut perlu memiliki laporan yang transparan agar bisa dilihat oleh para investor. Seharusnya hal ini bukan menjadi masalah sulit asalkan para stakeholder terkait seperti direktur, manajer hingga para pegawai ikut serta

mewujudkan perusahaan yang transparan dan akuntabel untuk menarik minat investor untuk membeli saham mereka.

Beberapa rekomendasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja UUS BPD kedepannya agar dapat memberikan *value added* bagi pengembangan keuangan syariah di Indonesia serta perekonomian daerah khususnya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Cahya, A. R. K. (2015). Efisiensi kinerja bank umum syariah di Indonesia Tahun 2010 –2012 Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). *Economics Development Analysis Journal*, 4(3), 223–232.
- Cahyono, E. F., & Rani, L. N. (2017). Performa Efisiensi Teknis Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah di Pulau Sumatera. *Human Falah*, 4.
- Edward, M. Y., & Anwar, A. Z. (2015). Analisis Efisiensi Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2013. *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1).
- Endri, E., & Abidin, Z. (2009). Kinerja efisiensi teknis bank pembangunan daerah: Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 21–29.
- Faisol, A., Zainuri, Z., & Yuliati, L. (2015). Analisis Efisiensi Perbankan Syariah Di Indonesia Pascakrisis Finansial Global 2008 Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Jember*.
- Fathony, M. (2013). Analisis efisiensi perbankan nasional berdasarkan ukuran bank dengan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). *Finance and Banking Journal*, 15(1).
- Firdaus, F., & Hosen, M. N. (2013). Efficiency of islamic banking using two stage approach of data envelopment analysis. *Bulletin of Monetary, Economic and Banking*, 16(2), 155–176.
- Gishkori, M., & Naeem, U. (2013). Tehnical efficiency of Islamic and commercial bank : evidence from Pakistan. *IOSR Journal of Business and Management*, 7(4).
- Hartono, I., Djohar, S., & Daryanto, H. K. (2008). Analisis Efisiensi BPR di Wilayah Jabodetabek dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis”. *Jurnal Manajemen Dan Agribisnis*, 5(2), 52–63.
- Isik, I., & Hassan, K. (2002). Cost and Profit Efficiency of the Turkish Banking Industri: An Empirical Investigation. *Financial Review*, 37(2), 257–279.
- Puspita, H. (2017). *Efisiensi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Syariah di*

Indonesia dengan pendekatan two stage data envelopment analysis periode 2012-2016. Universitas Airlangga.

- Putri, V. R., & Lukviarman, N. (2008). Pengukuran Kinerja Bank Komersial dengan Pendekatan Efisiensi: Studi Terhadap Perbankan Go Public di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 12(1).
- Rosman, R., Wahab, N. A., & Zainol, Z. (2014). Efficiency of Islamic banks during the financial crisis: An analysis of Middle Eastern and Asian countries. *Pacific-Basin Finance Journal*, 28, 76–90.
- Sufian, F. (2007). The efficiency of Islamic banking industry: A non-Parametric analysis with non-discretionary input variable. *Islamic Economic Studies*, 14(1), 53–78. <https://doi.org/10.1108/08288660710779399>
- Tuzuhroh, F. (2014). Analisis Efisiensi Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2010-2012. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 2(3).
- Yudistira, D. (2004). Efficiency in Islamic Banking : an Empirical Analysis of Eighteen Banks. *Islamic Economic Studies*, 12(1), 1–19.
- Yumanita, D., & Ascarya. (2006). Analisis Efisiensi perbankan syariah di Indonesia dengan Data Envelopment Analysis. *Tazkia Islamic Finance Dan Business Review*, VII.1(2).

BAGAIMANA DEPOSIT STRUCTURE DAN OWNERSHIP CONCENTRATION MEMENGARUHI PENGUNGKAPAN ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE?

Hasna Katsurayya, Tettet Fitrijanti, Fury Khristianty Fitriyah

Universitas Padjajaran, Bandung
Jl. Japati No.4, Sadang Serang, Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40133
Email: hasnakatsurayya@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Deposit Structure and Ownership Structure on the disclosure of Islamic Corporate Governance (ICG). Deposit Structure is proxied by the percentage of the Profit Sharing Investment Account (PSIA) to assets, while Ownership Structure used in this study is Blockholder Ownership and Managerial Ownership. The research uses descriptive and verification method with quantitative analysis approach. The population of this research is Islamic banks in Indonesia and Malaysia with a sample of 22 Islamic banks between the period of 2013 and 2017. The analytical tool employed is the classic assumption test and panel data regression analysis to test the hypothesis through t test and F. The results shows that simultaneous Profit Sharing Investment Account, Blockholder Ownership, and Managerial Ownership has significant effect on the disclosure of ICG. Partially, Profit Sharing Investment Account indicates significant positive effect on the disclosure of ICG, Blockholder Ownership shows significant positive effect on the disclosure of ICG, while the Managerial Ownership does not affect the disclosure of ICG.

Keywords : *Islamic Corporate Governance Disclosure, Profit Sharing Investment Account, Blockholder Ownership and Managerial Ownership*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Deposit Structure dan Ownership Structure terhadap pengungkapan Islamic Corporate Governance (ICG). Deposit Structure diprosikan dengan persentase Profit Sharing Investment Account (PSIA) terhadap aset, adapun Ownership Structure yang digunakan dalam penelitian ini adalah Blockholder Ownership dan Kepemilikan Manajerial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan analisis kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Sampel sebanyak 22 bank syariah selama periode 2013-2017. Alat analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi data panel dengan uji hipotesis uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Profit Sharing Investment Account, Blockholder Ownership dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ICG. Secara parsial Profit Sharing Investment Account berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ICG, Blockholder Ownership berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ICG, sedangkan Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ICG.

Kata kunci : *Pengungkapan Islamic Corporate Governance, PSIA, Blockholder Ownership dan Kepemilikan Manajerial*

1. PENDAHULUAN

Pengungkapan *Corporate Governance* (CG) yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah untuk menampilkan kualitas tata kelola yang mereka terapkan dalam rangka memperbaiki reputasi bank syariah di mata masyarakat (Albassam & Ntim, 2017). Pengungkapan *Islamic Corporate Governance* (ICG) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan bank (Srairi, 2015; Yadiat, Gustani., & Gia, 2017), Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan dan pengungkapan praktik CG dalam perspektif Islam sama pentingnya sebagaimana strategi bisnis dalam menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Berbagai penelitian yang membahas tentang pengungkapan *Corporate Governance*, Darmadi (2013) meneliti pengungkapan CG pada bank syariah di Indonesia menunjukkan nilai rata-rata pengungkapan yang relatif rendah, yaitu 60%. Penelitian Sulaiman (2015) tentang pengungkapan CG pada perbankan syariah di Malaysia pun menunjukkan hasil pengungkapan CG yang masih rendah dengan nilai rata-rata pengungkapan 51,42%. Abdullah, Percy & Stewart (2013) meneliti 23 bank syariah di Indonesia dan Malaysia menemukan rata-rata tingkat pengungkapan ICG sebesar 52%. Berdasarkan persentase tersebut menunjukkan tingkat pengungkapan ICG perbankan syariah di negara Indonesia dan Malaysia tergolong masih rendah.

Keunikan karakteristik dari perbankan syariah, dimana para deposan *Profit Sharing Investment Account* (PSIA) berbagi keuntungan dan kerugian dengan bank syariah, menjadi daya tarik untuk melihat sejauh mana faktor dari struktur kepemilikan akun oleh para depositor di bank syariah atau struktur deposit (*deposit structure*), dalam mempengaruhi tingkat pengungkapan *Islamic Corporate Governance*. Penelitian sebelumnya ditunjukkan oleh penelitian Grassa (2018) dimana bank syariah dengan konsentrasi kepemilikan yang tinggi, *leverage* yang tinggi dan tingkat *non-Profit Sharing Investment Account* (PSIA) yang tinggi melakukan pengungkapan ICG yang lebih rendah. Adapun bank syariah yang memiliki konsentrasi *Profit Sharing Investment Account* (PSIA) yang tinggi, ukuran bank, usia bank, bank yang *listed*, dan indeks transparansi negara melakukan pengungkapan ICG yang lebih tinggi.

Peneliti lainnya melihat stuktur kepemilikan (*ownership structure*) sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan ICG (Albassam & Ntim, 2017; Elmagrhi, Ntim, & Wang, 2016; Hikmah & Rahmayanti, 2011; Khan, Awan, Saleem, & Javeed, 2017). Penelitian ini menggunakan *blockholder ownership* dan *managerial ownership* karena kedua stuktur kepemilikan tersebut adalah struktur kepemilikan yang paling berpengaruh untuk mengurangi *agency cost*

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Grassa (2018), yang merupakan penelitian pertama yang meneliti pengaruh *deposit structure* dan *ownership concentration* terhadap ICGD, dengan membedakan hal-hal berikut; (1) sampel yang digunakan, yaitu perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia sebagai negara berkembang terletak di wilayah yang sama dengan budaya yang relatif sama secara substansial mempromosikan sistem perbankan Islam. Pada dua negara tersebut, Islam adalah agama mayoritas dengan jumlah populasi Muslim, kedua negara ini menyumbang sekitar 14% dari populasi Muslim dunia (PewResearch Center, 2009 dalam Amran, 2017). (2) Indeks pengukuran ICG, yaitu menggunakan indeks pada penelitian Yadiat dkk. (2017) yang disusun berdasarkan standar CG khusus Lembaga Keuangan Syariah Internasional, yaitu GSIFI (*Governance Standard for Islamic Financial Institutions*)-AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) dan IFSB (*Islamic Financial Standard Board*), serta berbagai penelitian sebelumnya.

2. TELAAH TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 AGENCY THEORY

Dalam kerangka teori keagenan, Jensen dan Mecklin dalam Jao dan Pagalung (2011) menjelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Prinsipal adalah pemegang saham atau investor, sedangkan agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan atau manajer. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di investor dan pengendalian di pihak manajemen. Adanya pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelolaan oleh manajemen cenderung menimbulkan konflik keagenan di antara prinsipal dan agen. Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan keinginan prinsipal, sehingga menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*). Dengan adanya masalah-masalah konflik kepentingan dan biaya-biaya agensi yang akan timbul maka diperlukan suatu konsep yang lebih jelas mengenai perlindungan terhadap *stakeholders*. Untuk itu, berkembang suatu konsep yang memperhatikan dan mengatur kepentingan para pihak yang terkait dengan pemilik dan pihak operasional suatu perusahaan yang dikenal dengan konsep *corporate governance*.

2.2 ASIMETRI INFORMASI

Scott (2011) menyatakan bahwa informasi dianggap asimetri jika satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak lainnya. Terdapat dua tipe asimetri utama yaitu (i) *adverse selection* dan (ii) *moral hazard*.

Adverse selection is a type of information asymmetry whereby one or more parties to business transaction, or potential transaction, have an

information advantage over other parties. Moral hazard is a type of information asymmetry whereby one or more parties to a business transaction, or potential transaction, can observe their actions in fulfillment of the transaction but other parties not.

2.3 ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE

Islamic Corporate Governance (ICG) merupakan istilah corporate governance dalam perspektif Islam (Abu-Tapanjeh, 2009; Bhatti & Bhatti, 2009; Hasan, 2009; Lewis, 2005). Pada dasarnya, *Islamic Corporate Governance* (ICG) memiliki tujuan yang sama dengan *corporate governance* umumnya, perbedaannya, ICG mengacu pada nilai agama Islam. ICG memadukan antara hukum Islam dengan model *stakeholder* dalam *corporate governance* (Bhatti & Bhatti, 2009).

Menurut Lewis (2005), terdapat dua sifat dari ICG. Pertama, seluruh aspek kehidupan, etika dan sosial perusahaan harus mengacu pada hukum Islam. Kedua, ICG juga harus mengacu pada etika bisnis dan prinsip-prinsip ekonomi dan keuangan Islam, di antaranya terkait dengan perintah zakat, pelarangan riba, larangan spekulasi dan perintah untuk mengembangkan sistem ekonomi berdasarkan *profit and loss sharing*.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Islamic Corporate Governance* merupakan *corporate governance* yang memadukan model *stakeholder* dengan hukum Islam sebagai landasan dalam menjalankan perusahaan. Perusahaan tidak hanya harus menjaga akuntabilitasnya di mata *stakeholder*, namun juga menjalankan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menjaga akuntabilitas kepada Allah SWT.

2.4 DEPOSIT STRUCTURE

Deposit structure adalah susunan dari unsur-unsur simpanan dalam perbankan syariah. Dalam bank syariah, klasifikasi penghimpunan dana didasarkan atas prinsip yang digunakan, bukan atas nama produk. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional, bank syariah dapat menggunakan prinsip penghimpunan dana berdasarkan dua, yaitu prinsip *wadi'ah* (titipan/*non-Profit Sharing Investment Account*) dan prinsip *mudharabah* (bagi hasil/ *Profit Sharing Investment Account*). Prinsip *wadi'ah* dalam perbankan syariah diterapkan dalam penghimpunan dana dalam bentuk giro dan tabungan (Antonio, 2001).

2.5 OWNERSHIP STRUCTURE

Struktur kepemilikan saham menjabarkan pihak-pihak yang memiliki saham suatu perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa pihak-pihak tersebut dapat dikatakan sebagai pemegang kekuasaan atas perusahaan, didasarkan pada jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Menurut Thomsen, Pedersen dan Kvist (2006), *blockholder* didefinisikan sebagai pemegang saham yang kepemilikannya paling sedikit 5%.

Adapun, kepemilikan manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dibandingkan dengan seluruh modal saham

(Boediono, 2005). Kepemilikan manajerial sangat penting, karena hal ini berkaitan dengan pengendalian operasional perusahaan. Dalam aplikasinya, kepemilikan manajerial akan mempengaruhi penentuan kebijakan serta pengambilan keputusan atas metode akuntansi yang akan digunakan perusahaan. Kepemilikan manajerial juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi *agency cost* (Boediono, 2005).

2.6 PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Konsep penggunaan model bagi hasil pada (*profit sharing*) pada bank syariah ini memikat para *investment depositors*. Sejumlah 62% dari rata-rata aset pada bank syariah di India dan 12 negara di Timur Tengah dan Asia Tenggara merupakan bagian dari *Profit Sharing Investment Account* (Archer, Karim, & Sundararajan, 2010).

Dalam perbankan syariah, para *investment depositors* menjadi bagian dari konflik agensi. Hal ini dikarenakan para *investment depositors* pada bank syariah berpartisipasi dalam laba rugi seperti halnya pemegang saham, namun mereka tidak memiliki jaminan atau hak suara untuk melindungi kepentingan diri mereka dari kesalahan manajemen, maka membuat mekanisme tata kelola yang baik sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan mereka dan untuk menjaga kepercayaan para *investment depositors* (Darmadi, 2013). Untuk memperoleh informasi dalam membuat keputusan, seperti halnya pemegang saham minoritas, *investment depositors* mengandalkan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Secara teori, *mudharabah*, salah satu akad dalam prinsip bagi hasil, tidak hanya meningkatnya *adverse selection*, *moral hazard* dan *monitoring cost* (Chong & Liu, 2009), tapi juga memperparah masalah keagenan dengan meningkatkan peluang untuk pengambilalihan manajerial atas aset perusahaan (Safieddine, 2009).

Penelitian Yadiat, dkk. (2017) menunjukkan, pengungkapan ICG pada perbankan syariah di negara QISMUT berpengaruh positif signifikan terhadap disiplin pasar serta kinerja keuangan bank yang dihitung menggunakan rasio ROA dan ROE. Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Srairi (2015) pada perbankan syariah di negara GCC yang juga menunjukkan pengungkapan ICG berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan dan pengungkapan praktik CG dalam perspektif Islam sama pentingnya sebagaimana strategi bisnis dalam menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Grassa (2018) meneliti pengaruh *deposit structure* yang dikelompokkan menjadi *Profit Sharing Investment Account* (PSIA) dan non-PSIA terhadap pengungkapan *Islamic Corporate Governance*. Hasil penelitian menunjukkan indeks pengungkapan ICG lebih rendah pada bank syariah dengan konsentrasi kepemilikan non-PSIA yang tinggi, sedangkan indeks pengungkapan ICG lebih besar pada bank syariah dengan konsentrasi kepemilikan PSIA yang tinggi. Perbankan syariah dengan *equity-based capital structure* yang didominasi oleh kepemilikan PSIA memiliki risiko yang besar dengan adanya penarikan dana oleh para *investment depositors*

atau pemilik akun PSIA. Sehingga bank syariah meningkatkan pengungkapannya untuk mempertahankan para pemilik akun PSIA. Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : *Deposit Structure* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Corporate Governance*

Kepemilikan saham dengan konsentrasi tinggi akan menyebabkan informasi yang diungkapkan semakin sedikit. Sebaliknya, apabila kepemilikan saham semakin tersebar, semakin banyak informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan. Hal ini terjadi karena adanya dorongan publik dalam memperoleh sebanyak mungkin informasi terkait perusahaan tempat ia berinvestasi, sebagai salah satu bentuk pengawasan publik terhadap manajemen (Nuryaman, 2009). Penelitian terdahulu menunjukkan tingkat pengungkapan *Corporate Governance* memiliki hubungan negatif dengan kepemilikan *blockholder* (Albassam & Ntim, 2017; Elmagrhi et al., 2016; Khan et al., 2017; Nelwan, 2017; Ntim, Opong, Danbolt, & Thomas, 2012). Sehingga, semakin banyak jumlah kepemilikan *blockholder* akan menyebabkan pengungkapan *Islamic Corporate Governance* berkurang. Berdasarkan uraian di atas maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

H2 : *Blockholder Ownership* berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Corporate Governance*

Menurut Boediono (2005) kepemilikan manajerial sangat penting, karena hal ini berkaitan dengan pengendalian operasional perusahaan. Dalam aplikasinya, kepemilikan manajerial akan mempengaruhi penentuan kebijakan serta pengambilan keputusan atas metode akuntansi yang akan digunakan perusahaan. Dikaitkan dengan pengungkapan, semakin banyak kepemilikan manajerial akan menyebabkan pengungkapan yang lebih sedikit.

Penelitian Elmagrhi (2016) dan Nelwan (2017) menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Islamic Corporate Governance*, artinya semakin banyak kepemilikan manajerial maka semakin rendah tingkat pengungkapan. Hal ini dikarenakan pihak manajemen sudah memiliki akses informasi yang besar tanpa harus melalui laporan tahunan perusahaan terpublikasi atau bahkan pihak manajemen dengan sengaja menahan informasi agar terhindar dari terjadinya pemanfaatan informasi oleh pihak-pihak yang merupakan pesaing perusahaan (Nuryaman, 2009). Berdasarkan uraian tersebut, maka diajukan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Corporate Governance*

3. METODE PENELITIAN

Periode penelitian ini adalah tahun 2013-2017. Periode dipilih untuk melihat kondisi yang relatif terbaru, serta diawali pada tahun 2013, dimana pada tahun tersebut terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi pada negara Indonesia dan Malaysia.

Populasi pada penelitian ini ialah perbankan syariah pada negara Indonesia dan Malaysia Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 29 perusahaan.

Tabel 1. Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia

| No | Negara | No | Nama Bank Syariah |
|----|-----------|----|---|
| 1 | Indonesia | 1 | PT. Bank Muamalat Indonesia |
| | | 2 | PT. Bank Victoria Syariah |
| | | 3 | PT. Bank BRI Syariah |
| | | 4 | PT. Bank Jabar Banten Syariah |
| | | 5 | PT. Bank BNI Syariah |
| | | 6 | PT. Bank Syariah Mandiri |
| | | 7 | PT. Bank Mega Syariah |
| | | 8 | PT. Bank Panin Syariah |
| | | 9 | PT. Bank Syariah Bukopin |
| | | 10 | PT. BCA Syariah |
| | | 11 | PT. Maybank Syariah Indonesia |
| | | 12 | PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah |
| | | 13 | PT. Bank Aceh |
| 2. | Malaysia | 1 | Affin Islamic Bank Berhad |
| | | 2 | Al Rajhi Banking & Investment Corporation (Malaysia) Berhad |
| | | 3 | Alliance Islamic Bank Berhad |
| | | 4 | AmBank Islamic Berhad |
| | | 5 | Asian Finance Bank Berhad |
| | | 6 | Bank Islam Malaysia Berhad |
| | | 7 | Bank Muamalat Malaysia Berhad |
| | | 8 | CIMB Islamic Bank Berhad |
| | | 9 | HSBC Amanah Malaysia Berhad |
| | | 10 | Hong Leong Islamic Bank Berhad |
| | | 11 | Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad |
| | | 12 | Maybank Islamic Berhad |
| | | 13 | OCBC Al-Amin Bank Berhad |
| | | 14 | Public Islamic Bank Berhad |

| No | Negara | No | Nama Bank Syariah |
|-------|--------|----|----------------------------------|
| | | 15 | RHB Islamic Bank Berhad |
| | | 16 | Standard Chartered Saadiq Berhad |
| Total | | 29 | |

Sumber : Data diolah, 2019

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah salah satu teknik dari *nonprobability sampling* yaitu *purposive sampling*, dengan kriteria, (1) Bank syariah yang beroperasi selama periode 2013-2017; (2) Bank syariah yang menerbitkan *annual report* selama periode 2013 – 2017; dan (3) Bank yang tidak memiliki kepemilikan manajerial $\geq 5\%$. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel tersebut, diperoleh bank syariah yang akan digunakan sebagai sampel penelitian berjumlah 22 bank syariah dari 29 bank syariah di negara Indonesia dan Malaysia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deksriptif dan verifikatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder, dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan dan laporan data publikasi. Pengujian data menggunakan statistik deskriptif, uji beda *t-test*, uji asumsi klasik, analisis regresi data panel, uji f, dan uji t.

Tabel 2. Indeks Pengungkapan ICG

| No | Dimensi Pengungkapan | Jumlah Item |
|----------------------|---|-------------|
| A Sharia Governance | | |
| 1 | Dewan Pengawas Syariah (Shariah Supervisory Board) | 9 |
| 2 | Unit Kepatuhan Syariah Internal (Internal Shariah Compliance Unit) | 4 |
| 3 | Unit Audit Syariah Internal (Internal Sharia Review/Audit Unit) | 4 |
| B General Governance | | |
| 4 | Dewan Direktur (Board of Director) | 7 |
| 5 | Dewan Komite (Board Committees) | 10 |
| 6 | Internal Kontrol dan Internal Audit (Internal Control and External Audit) | 7 |
| 7 | Manajemen Risiko (Risk Management) | 14 |
| 8 | Investment Account Holder (IAH) | 9 |
| Jumlah | | 64 |

Sumber : Yadiat dkk. (2017)

Indeks pengungkapan ICG atau *Islamic Corporate Governance Disclosure Index* (ICGDI) dalam penelitian ini menggunakan indeks pengungkapan ICG pada penelitian Yadiat dkk. (2017) yang dikembangkan dari standar CG LKS Internasional yang dikeluarkan oleh IFSB. IFSB telah

mengeluarkan 2 standar khusus CG untuk bank syariah yaitu IFSB No. 3 tentang *Guiding Principles on CG for Institutions Offering Only Islamic Financial Services (Excluding Islamic Insurance (Takaful) Institution and Islamic Mutual Funds)* dan IFSB No. 10 tentang *Guiding Principles Institutions on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services*. Dan juga mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan seperti Majid, Sulaiman dan Ariffin (2015), Darmadi (2013), Abdullah (2013), serta Grassa dan Matoussi (2014). Dengan total ICGDI terdiri dari 8 dimensi yang mencakup 64 item pengungkapan.

Berikut tabel operasionalisasi variabel yang menggambarkan setiap indikator variabel dalam penelitian ini :

Tabel 3. Tabel Operasionalisasi Variabel

| Variabel | Sub Variabel | Konsep Variabel | Indikator | Skala |
|----------------------|-----------------------------|--|---|-------|
| Deposit Structure | PSIA (X1) | 1. Antonio (2001) | Variabel deposit structure diprosikan dengan Profit Sharing Investment Account (PSIA), dimana PSIA = $\frac{\text{Total deposito kategori PSIA}}{\text{Total Aset}}$ | Rasio |
| | | 2. Grassa (2018) | | |
| Ownership Structure | Blockholder Ownership (X2) | 3. Griffin dan Ebert (2007:115) | Blockholders Ownership Jumlah saham yang dimiliki = $\frac{\text{blockholder}}{\text{Jumlah saham beredar}}$ | Rasio |
| | | 4. Corner et al. Dalam Herawati (2014) | | |
| | Kepemilikan Manajerial (X3) | Boediono (2005) | Kepemilikan Manajerial = $\frac{\text{Jml saham dimiliki manajemen}}{\text{Jml modal saham yang beredar}}$ | Rasio |
| Pengungkapan ICG (Y) | ICGD (Y) | Yadiat, dkk. 2017) | $ICGD = \frac{\text{Skor item yang diungkapkan}}{\text{Skor maksimal pengungkapan}}$ | Rasio |
| Variabel Kontrol | Profitability | Palepu dkk (2014) | $ROE = \frac{\text{net income}}{\text{equity}}$ | Rasio |
| | Leverage | Palepu dkk (2014) | $\text{Leverage} = \frac{\text{total hutang}}{\text{total ekuitas}}$ | Rasio |
| | Size | Asnawi & Wijaya (2005) | Size = log(aset) | Rasio |
| | Age | Lestari P. (2013) | Age = lamanya bank syariah berdiri | Rasio |

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 STATISTIK DESKRIPTIF

Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan data yang terkumpul untuk membuat kesimpulan umum terhadap populasi. Dalam penelitian ini analisis statistik deskriptif yang digunakan meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata dan simpangan baku.

Tabel 4. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

| Ukuran | ICGD (%) | PSIA | BLOCK (%) | KEPMAN (%) |
|-----------------|----------|------|-----------|------------|
| <i>Mean</i> | 63.02 | 0.33 | 98.31 | 0.0002 |
| <i>Median</i> | 63.28 | 0.16 | 100 | 0.0000 |
| <i>Max</i> | 75 | 0.78 | 100 | 0.0056 |
| <i>Min</i> | 51.56 | 0.00 | 79.80 | 0.0000 |
| <i>Std. Dev</i> | 6.35 | 0.31 | 5.63 | 0.0010 |

Sumber: data diolah

Interpretasi untuk hasil statistik deskriptif di atas adalah sebagai berikut:

a. *Islamic Corporate Governance Disclosure Index*

Dari hasil penelitian diperoleh rata-rata *Islamic Corporate Governance Disclosure Index* sebesar 63.02%, dengan ICGD tertinggi sebesar 75% dan ICGD terendah sebesar 51.56%. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pengungkapan pada penelitian sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengungkapan ICG pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia secara umum.

b. *Profit Sharing Investment (PSIA)* adalah rasio total deposit yang termasuk kategori PSIA terhadap total aset. Hasil penelitian diperoleh rata-rata PSIA sebesar 0,33, dengan PSIA tertinggi sebesar 0,78 dan PSIA terendah sebesar 0,00. Nilai rata-rata PSIA dari sampel yang diteliti tergolong rendah apabila dibandingkan dengan persentase rata-rata jumlah PSIA pada bank syariah di negara Timur Tengah dan Asia Tenggara, yaitu 62%.

c. *Blockholders Ownership* = rasio total saham yang dimiliki *blockholders* terhadap jumlah saham yang beredar. Hasil penelitian diperoleh rata-rata *Blockholders Ownership* sebesar 98,31%, dengan *Blockholders Ownership* tertinggi sebesar 100,0 % dan *Blockholders Ownership* terendah sebesar 79,80%. *Blockholder Ownership* menunjukkan konsentrasi kepemilikan pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia yang tinggi.

- d. Kepemilikan Manajerial = persentase jumlah saham yang dimiliki manajerial dari seluruh jumlah saham yang beredar (Boediono, 2005). Hasil penelitian diperoleh rata-rata Kepemilikan Manajerial sebesar 0,0002%, dengan Kepemilikan Manajerial tertinggi sebesar 0.0056% dan Kepemilikan Manajerial terendah sebesar 0,00%. Kepemilikan manajerial pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia terbilang rendah.

Tabel 5. Analisis Deskriptif Variabel Dependen per Negara

| Dimensi | Indonesia | Malaysia |
|---------------------------|-----------|----------|
| <i>Sharia Governance</i> | 55,6% | 66,7% |
| <i>General Governance</i> | 78,6% | 70,3% |
| ICGD | 67,2% | 59,6% |

Sumber: data diolah

Pengungkapan ICG pada penelitian ini terdiri dari *Sharia Governance* (SG) dan *General Governance* (GG). Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan pengungkapan ICG pada bank syariah di Indonesia lebih tinggi daripada pengungkapan ICG di Malaysia. GG pada kedua negara memiliki skor pengungkapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengungkapan SG. Namun, pada SG, bank syariah Malaysia memiliki skor pengungkapan yang lebih tinggi. Regulasi terkait dengan *Sharia Governance* (SG) di Indonesia dan Malaysia apabila diperbandingkan menunjukkan regulasi SG di Malaysia lebih komprehensif dibandingkan dengan regulasi SG di Indonesia, hal ini ditunjukkan berdasarkan implementasi standar AAOIFI dan IFSB yang diterapkan pada regulasi SG di Indonesia dan Malaysia (Amalia, 2017).

Secara umum, dapat disimpulkan dengan rata-rata pengungkapan ICG 63% pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia menunjukkan tingkat pengungkapan yang cukup baik. Namun pengungkapan SG masih rendah dibandingkan dengan pengungkapan GG. Aspek syariah pada bank syariah harus ditingkatkan guna menambah nilai tambah bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional, dan juga untuk menjaga nasabah bank syariah yang memilih bank syariah berdasarkan motif religius yang tentunya memperhatikan kepatuhan syariah. Penelitian Echchabi (2012) menunjukkan nasabah bank syariah di Malaysia utamanya dipacu oleh motif religius dari para nasabah tersebut. Sedangkan, nasabah bank syariah di Indonesia lebih didominasi oleh nasabah rasional yang mengedepankan aspek rasional dalam pengambilan keputusan untuk menabung di bank syariah.

4.2 ANALISIS REGRESI DATA PANEL

Sebelum dilakukan pembentukan model regresi, selanjutnya dilakukan pengujian asumsi terlebih dahulu supaya model yang terbentuk memberikan estimasi yang BLUE (*Best Linier Unbiased Estimated*). Pengujian asumsi ini

terdiri atas empat pengujian, yakni uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

Tabel 6. Persamaan Regresi Data Panel

| Dependent Variable: ICGD | | | | |
|---|-------------|-----------------------|-------------|-----------|
| Method: Panel Least Squares | | | | |
| Total panel (balanced) observations: 60 | | | | |
| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
| C | -1.020728 | 0.635655 | -1.605790 | 0.1144 |
| PSIA | 0.061917 | 0.019127 | 3.237168 | 0.0021 |
| BLOCK | 0.925226 | 0.278036 | 3.327726 | 0.0016 |
| KEPMAN | -0.102038 | 2.258441 | -0.045181 | 0.9641 |
| PROF | 0.002781 | 0.000872 | 3.189608 | 0.0024 |
| LEV | -0.082029 | 0.014611 | -5.614022 | 0.0000 |
| SIZE | 0.809598 | 0.229029 | 3.534916 | 0.0009 |
| AGE | 0.265858 | 0.054987 | 4.834919 | 0.0000 |
| R-squared | 0.753675 | Mean dependent var | | 1.797500 |
| Adjusted R-squared | 0.720516 | S.D. dependent var | | 0.046746 |
| S.E. of regression | 0.024713 | Akaike info criterion | | -4.439428 |
| Sum squared resid | 0.031757 | Schwarz criterion | | -4.160182 |
| Log likelihood | 141.1828 | Hannan-Quinn criter. | | -4.330199 |
| F-statistic | 22.72901 | Durbin-Watson stat | | 0.591182 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | | |

Persamaan regresi yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$ICGD = -1,021 + 0,062 PSIA + 0,925 BLOCK - 0,102 KEPMAN$$

- Nilai konstanta -1,021 menunjukkan besarnya rata-rata *Islamic Corporate Governance* jika PSIA dan variabel lainnya bernilai 0 (nol).
- Koefisien regresi untuk PSIA (X_1) adalah sebesar 0,062 dan bertanda positif, artinya setiap terjadi peningkatan PSIA dan variabel bebas lainnya diasumsikan konstan, maka diprediksikan akan meningkatkan nilai PSIA sebesar 0,062. Nilai PSIA yang tinggi menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance* tinggi/meningkat.
- Koefisien regresi untuk BLOCK (X_2) adalah sebesar 0,925 dan bertanda positif, artinya setiap terjadi peningkatan *blockholder ownership* dan variabel bebas lainnya diasumsikan konstan, maka diprediksi akan meningkatkan *Islamic Corporate Governance* sebesar 0,925.
- Koefisien regresi untuk KEPMAN (X_3) adalah sebesar -0,102 dan bertanda negatif, artinya setiap terjadi peningkatan kepemilikan manajerial dan variabel bebas lainnya diasumsikan konstan, maka

diprediksi akan menurunkan *Islamic Corporate Governance* sebesar 0,102.

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat besarnya kontribusi yang diberikan oleh *Profit Sharing Investment Account*, *Blockholder Ownership*, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan *Islamic Corporate Governance*. Pada tabel 4.7 di atas, diketahui nilai R-Squared yang diperoleh sebesar 0,754 atau 75,4%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *Profit Sharing Investment Account*, *Blockholder Ownership*, dan Kepemilikan Manajerial secara simultan memberikan kontribusi sebesar 75,4% terhadap Pengungkapan *Islamic Corporate Governance*, sedangkan 24,6% sisanya merupakan pengaruh dari faktor lain yang tidak diteliti.

Tabel 7. Uji F (Simultan)

| F_{hitung} | F_{tabel} | Prob. | α | Keputusan | Kesimpulan |
|--------------|-------------|-------|----------|---------------|------------|
| 22,729 | 2,192 | 0,002 | 0,05 | H_0 ditolak | signifikan |

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 22,729 jauh lebih besar dari pada nilai F_{tabel} 2,192, dan nilai probabilitas sebesar 0,002 menunjukkan secara simultan *Profit Sharing Investment Account*, *Blockholder Ownership*, dan Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Corporate Governance*.

4.3 PENGARUH *DEPOSIT STRUCTURE* TERHADAP PENGUNGKAPAN *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Berdasarkan hasil uji t parsial, diperoleh bahwa variabel *deposit structure* memiliki koefisien regresi sebesar 0,0021 lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *deposit structure* secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Corporate Governance*. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa variabel *deposit structure* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Corporate Governance* diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah dengan komposisi kepemilikan PSIA yang tinggi, memiliki tingkat pengungkapan *Islamic Corporate Governance* yang lebih tinggi. Perbankan syariah perlu meningkatkan pengungkapannya untuk menjaga dari risiko yang besar atas penarikan dana oleh para pemilik PSIA.

Sebagai pengembangan penelitian Grassa (2018), hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Grassa (2018) yang menunjukkan bahwa bank syariah melakukan pengungkapan *Islamic Corporate Governance* yang lebih tinggi pada bank syariah dengan komposisi *Profit Sharing Investment Account* (PSIA) yang lebih besar. Bagaimanapun, Malghaes dan Al-Saad, 2013 dalam Grassa (2018) menyatakan, dalam praktiknya, dalam menjaga hak para pemilik PSIA, tidak cukup efektif dari sisi CG saja.

4.4 PENGARUH *BLOCKHOLDER OWNERSHIP* TERHADAP PENGUNGKAPAN *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Berdasarkan hasil uji parsial diperoleh bahwa variabel Kepemilikan *Blockholder* memiliki koefisien regresi sebesar 3,327 lebih besar dari nilai t tabel -1,675 ($t_{hitung} > -t_{tabel}$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan *Blockholder* secara individu tidak berpengaruh negatif dan signifikan dalam mempengaruhi pengungkapan ICG pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa variabel Kepemilikan *Blockholder* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan ICG ditolak. Berdasarkan nilai koefisien regresi, kepemilikan *blockholder* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,0016, lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Hasil pengujian tersebut menunjukkan pengaruh signifikansi positif, yang artinya Kepemilikan *Blockholder* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Islamic Corporate Governance*.

Hasil penelitian ini tidak sama dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Grassa (2018) yang menunjukkan Kepemilikan *Blockholder* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Islamic Corporate Governance*. Begitupun hasil penelitian Khan dkk (2017) yang menunjukkan Kepemilikan *Blockholder* berpengaruh negatif terhadap implementasi dan pengungkapan *Islamic Corporate Governance*. Kepemilikan *blockholder* yang besar menunjukkan kepemilikan yang terkonsentrasi. Pada penelitian Sijabat (2017), konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap risiko bank, yang artinya semakin terkonsentrasi kepemilikan maka semakin besar risiko bank tersebut.

Peningkatan kepemilikan saham, akan berbanding lurus dengan *cash flow* terhadap pemegang saham. Jika harga saham atau nilai perusahaan turun maka pemegang saham pengendali yang paling banyak merasakan dampak kerugian dari penurunan nilai perusahaan tersebut. *Capital markets transactions hypothesis* Healy dan Palepu (2001) menghipotesiskan bahwa ketika manajemen/pemegang saham pengendali perusahaan berada pada posisi *superior information*, maka akan menimbulkan asimetri informasi antara pemegang saham pengendali/ manajemen dengan pemegang saham minoritas. Tingginya asimetri informasi akan meningkatkan biaya modal sehingga akan menurunkan harga saham perusahaan tersebut, oleh karena itu pemegang saham pengendali harus menjaga kepentingan pemegang saham minoritas dengan mendorong manajemen untuk meningkatkan pengungkapan informasi guna mengurangi asimetri informasi.

4.5 PENGARUH *MANAGERIAL OWNERSHIP* TERHADAP PENGUNGKAPAN *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Berdasarkan hasil uji parsial diperoleh bahwa variabel Kepemilikan Manajerial memiliki koefisien regresi sebesar -0,045 lebih besar dari -1,675 ($-t_{tabel}$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Manajerial secara individu tidak berpengaruh negatif dan signifikan dalam mempengaruhi

pengungkapan *Islamic Corporate Governance* pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa variabel *managerial ownership* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Islamic Corporate Governance* ditolak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Elmagrhi dkk (2016) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan sukarela *Corporate Governance*. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Juhmani (2013) dan Nelwan (2017) yang membuktikan bahwa kepemilikan saham oleh pihak manajemen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan. Hal ini dimungkinkan karena statistik jumlah kepemilikan manajerial rata-rata pada sampel penelitian relatif kecil, sehingga besarnya kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi pengungkapan *Islamic Corporate Governance*.

5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. PSIA berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Corporate Governance* pada perbankan syariah pada negara Indonesia dan Malaysia periode 2013-2017. Tingkat pengungkapan ICG lebih tinggi pada bank syariah yang memiliki komposisi PSIA yang tinggi, hal ini dilakukan bank syariah dalam rangka mengantisipasi risiko penarikan dana oleh para pemilik PSIA.
2. *Ownership Structure* dalam penelitian ini yaitu; (a) *Blockholder Ownership* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Corporate Governance* pada perbankan syariah pada negara Indonesia dan Malaysia (BEI) tahun 2013-2017. Bank syariah dengan konsentrasi kepemilikan yang tinggi melakukan pengungkapan ICG yang lebih banyak daripada bank syariah dengan kepemilikan *blockholder* yang rendah, (b) Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Corporate Governance* pada perbankan syariah pada negara Indonesia dan Malaysia (BEI) tahun 2013-2017. Hal ini dimungkinkan karena jumlah kepemilikan manajerial yang sangat sedikit, sehingga besarnya kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ICG.
3. Secara simultan, PSIA dan *Blockholder Ownership*, Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Corporate Governance* pada perbankan syariah pada negara Indonesia dan Malaysia (BEI) tahun 2013-2017 dengan kontribusi pengaruh yang diberikan sebesar 75,4%.

6. DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, W. A., Percy, M., & Stewart, J. (2013). Sharia disclosure in

- Malaysian and Indonesian Islamic banks: The sharia governance system. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 4(2), 100–131.
- Abu-Tapanjeh, A. M. (2009). Corporate governance from the Islamic perspective: A comparative analysis with OECD principles. *Critical Perspectives on Accounting*, 20, 556–567.
- Albassam, W. M., & Ntim, C. G. (2017). The effect of Islamic values on voluntary corporate governance disclosure: The case of Saudi-listed firms. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(2), 182–202.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. (D. M. H. Basri & D. Farida R, Eds.) (I). Jakarta: Gema Insani.
- Archer, S., Karim, A. A. R., & Sundararajan, V. (2010). ‘Supervisory, regulatory, and capital adequacy implications of profit-sharing investment accounts in Islamic finance’. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 1(1), 10–31.
- Asnawi, S. K. da. W., & C. (2005). *Riset Keuangan: Pengujian-pengujian Empiris*. Jakarta: PT Gramedia.
- Awadh, A., & Bukair, A. (2013). *Factors Influencing Corporate Social Responsibility Disclosure By Islamic Banks*.
- Bhatti, M., & Bhatti, I. (2009). Development in legal issues of corporate governance in Islamic finance. *Journal of Economic and Administrative Sciences*, 25(1), 67–91.
- Boediono, G. S. (2005). Kualitas laba: Studi pengaruh mekanisme corporate governance dan dampak manajemen laba dengan menggunakan analisis jalur. *Simposium Nasional Akuntansi, VIII*, 172.
- Chong, B., & Liu, M. (2009). Islamic banking: Interest-free or interest-based?’. *Pacific-Basin Finance Journal*, 17(1), 125–144.
- Darmadi, S. (2013). Corporate governance disclosure in the annual report: An exploratory study on Indonesian Islamic banks. *Humanomics*, 29(1), 4–23.
- Elmagrhi, M. H., Ntim, C. G., & Wang, Y. (2016). Antecedents of voluntary corporate governance disclosure: A post-2007/08 financial crisis evidence from the influential UK Combined Code. *Corporate Governance*, 16(3), 507–538.
- Grassa, R. (2018). Deposits structure, ownership concentration and corporate governance disclosure in GCC Islamic banks: Empirical evidence. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(4), 587–606.
- Hasan, Z. (2009). Corporate Governance: Western and Islamic Perspectives. *International Review of Business Research Papers*, 5(1), 277–293.

- Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2001). Information Asymmetry, Corporate Disclosure, and Capital Market. *A Review of Empirical Disclosure Literature. Journal of Accounting and Economic*, 31, 405–440.
- Herawati, N. T., Sulindawati, N. L. G. E., & Kristiani, K. E. (2014). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha.
- Hikmah, N., & Rahmayanti, D. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Corporate Governance dalam Laporan Tahunan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di BEI. *Simposium Nasional Akuntansi, XIV*, 1–32.
- Jao, R. da. P., & G. (2011). Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(1), 43–54.
- Juhmani, O. (2013). Ownership Structure and Corporate Voluntary Disclosure: Evidence from Bahrain. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 3(2).
- Khan, M. Y., Awan, T., Saleem, N., & Javeed, A. (2017). The Impact of Islamic Governance Mechanisms on Corporate Governance Compliance and Disclosure.
- Lestari, P. (2013). Determinants of islamic social reporting in syariah banks: Case of Indonesia. *International Journal of Business and Management Invention*, 2(10), 28–34.
- Lewis, M. K. (2005). Islamic Corporate Governance. *Review of Islamic Economics*, 9(1), 5–29.
- Nelwan, M. L. (2017). Corporate Governance Disclosure in the Existence of Ownership Structure and Growth Opportunities. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 21(2).
- Ntim, C. G., Opong, K., Danbolt, J., & Thomas, D. (2012). Voluntary corporate governance disclosures by post-Apartheid South African corporations'. *Journal of Applied Accounting Research*, 13(2), 122–144.
- Nuryaman, N. (2009). Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sukarela. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(1), 89–116.
- Palepu, K. G., Healy, P. M. B., & L, V. (2014). *Business analysis and valuation: using financial statement*, 3e. Thomson South Western.
- Safieddine, A. (2009). Islamic financial institutions and corporate governance: new insights for agency theory". *Corporate Governance: An International Review*, 17(2), 142–58.

- Scott, W. R. (2011). *Financial Accounting Theory* (Fifth). USA: Prentice-Hall.
- Sijabat, Y. P. (2017). *Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan dan Tipe Kepemilikan terhadap Kinerja dan Risiko Perbankan di Indonesia*. Tesis Magister Universitas Gadjah Mada.
- Srairi, S. (2015). Corporate Governance Disclosure Practices and Performance of Islamic Banks in GCC Countries. *Journal of Islamic Finance*, 176(3132), 1–17.
- Sulaiman, M., Majid, N. A., & Ariffin, N. M. (2015). Corporate governance of Islamic financial institutions in Malaysia. *Asian Journal of Business and Accounting*, 8(1), 65–94.
- Thomsen, S., Pedersen, T., & Kvist, H. K. (2006). Blockholder ownership: Effects on firm value in market and control based governance systems. *Journal of Corporatwie Finance*, 246–269.
- Yadiat, W., Gustani, A., & Gia. (2017). Pengaruh Pengungkapan Islamic Corporate Governance dan Islamic Corporate Social Responsibility terhadap Disiplin Pasar dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Bank Syariah di Negara QISMUT). *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 15(24).

APA PERTIMBANGAN MASYARAKAT BERASURANSI SYARIAH DI JABODETABEK?

Tati Handayani, Fitri Yetty, dan Prima Dwi Priyatno

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Depok, Jawa Barat 12450

Email: primadpriyatno@upnvj.ac.id

ABSTRACT

The presence of sharia insurance becomes one of the choices of muslim community in investing, because insurance as one of the investment ways to face risks in the future. The success of sharia insurance companies are cannot be neglected from the participation of people in understanding the importance of taking sharia insurance. The research aims to discover and analyzing factors that can influence people's perception of using Islamic insurance. The research method used is quantitative descriptive analysis. For population and sample are Jabodetabek community. This method uses Convenience Sampling Technique, and the data analysis uses Partial Least Square (PLS). This research shows that the most important factor which is influencing the community in deciding to take Sharia insurance is the level of understanding of sharia continued with the level of product quality, but it can be seen that the premium and promotion indicators are still less known by the respondent. So, the insurance company need to be more socialize sharia insurance to the public.

Keywords: *premium, contribution, product, promotion, sharia, sharia insurance*

ABSTRAK

Kehadiran asuransi syariah menjadi salah satu pilihan masyarakat muslim dalam berinvestasi, karena asuransi merupakan salah satu cara investasi untuk menghadapi resiko di masa yang akan datang. Keberhasilan perusahaan asuransi syariah tidak bisa luput dari peran serta masyarakat dalam pemahaman akan pentingnya berasuransi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat untuk menggunakan asuransi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa kuantitatif. Untuk populasi dan sampel adalah masyarakat Jabodetabek menggunakan Teknik *Convenience Sampling* dan untuk analisis data menggunakan PLS (*Partial Least Square*). Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor paling signifikan yang memengaruhi masyarakat dalam memutuskan untuk berasuransi syariah adalah tingkat pemahaman tentang syariah dilanjut dengan tingkat kualitas produk, namun dilihat dari indikator premi dan promosi masih kurang diketahui oleh responden, sehingga perusahaan asuransi harus lebih mensosialisasikan asuransi syariah ke masyarakat.

Kata kunci: *premi / kontribusi, produk, promosi, syariah, asuransi syariah*

1. PENDAHULUAN

Asuransi sendiri, awalnya merupakan cara atau usaha mempersiapkan dalam menghadapi risiko yang telah disepakati sekelompok orang, bersepakat untuk menanggung bersama atas risiko apabila ada salah satu dari kelompok tersebut tertimpa musibah. Asuransi pada awal mula dikenal berupa asuransi kebakaran, yaitu di Eropa Barat, kemudian pada abad ke 13 dan 14 terjadi peningkatan transportasi jalur laut baik untuk mengirim barang atau pengantaran orang antar pulau sehingga berkembang pula asuransi pengangkutan laut yang berasal dari Romawi. Jenis asuransi pada saat itu yang berkembang adalah jenis asuransi kaputalis, dimana asuransi dibentuk untuk mendapatkan keuntungan dan didasarkan atas perhitungan niaga. Pada abad ke 19 barulah dikenal istilah asuransi jiwa (Ridlwani, 2017).

Dalam perkembangannya, asuransi bertransformasi menjadi sebuah lembaga keuangan dalam pengelolaan risiko. Asuransi termasuk kedalam golongan lembaga keuangan bukan bank, sebagai lembaga keuangan, asuransi memiliki fungsi dan karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, yaitu dalam mengelola atau pengalihan risiko dari nasabah sebagai tertanggung (*original risk bearer*) pada perusahaan asuransi sebagai penanggung.

Asuransi konvensional, perusahaan asuransi mengumpulkan atau menarik dana dari para nasabah berupa premi yang dibayarkan secara berkala, dengan imbalan penanggungan risiko dengan ganti rugi dari perusahaan asuransi apabila telah terjadi risiko, besaran nilai ganti rugi telah disepakati diawal antara nasabah dan perusahaan asuransi, dengan demikian transaksi tersebut merupakan perpindahan risiko (*transfer of risk*) dari nasabah kepada perusahaan asuransi. Hal ini berbeda dengan asuransi syariah, dimana dalam transaksinya mempunyai semangat kebersamaan yaitu saling tolong menolong (*ta'awun*) dalam kebaikan, pada transaksinya asuransi Syariah mempunyai dua akad terpisah antara nasabah dengan perusahaan asuransi dan antar sesama nasabah. Perusahaan asuransi syariah hanya sebagai administrator dalam mengelola dana nasabah, dimana nasabah mempercayakan dana berupa kontribusi secara berkala, kontribusi tersebut merupakan hibah nasabah untuk kemudian dikelola oleh perusahaan asuransi syariah, sehingga pada implikasinya tidak adanya perpindahan risiko (*transfer of risk*) dari nasabah kepada perusahaan asuransi.

Kehadiran asuransi syariah menjadi salah satu pilihan masyarakat, khususnya bagi umat muslim yang diperintahkan untuk memperhatikan semua aktifitas kehidupannya, termasuk transaksi-transaksi muamalah yang dilakukan agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah. Asuransi salah satu cara investasi untuk menghadapi resiko di masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT agar membuat perencanaan untuk berusaha mempersiapkan diri dalam menghadapi hari esok, pada al-Quran surat al-Hasyr ayat 18 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتُنظِرْ نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الحشر:18)

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok; dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Hasyr:18)

UU no 40 tahun 2014 tentang asuransi syariah, menjelaskan definisi asuransi syariah sebagai berikut:

“Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi.”

Sedangkan asuransi syariah didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah mendefinisikan:

“Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.” Dewan Syariah Nasional (DSN), (2001)

Perkembangan industri syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang positif, seiring dengan banyaknya pertumbuhan perusahaan asuransi syariah. Hal ini didorong juga dengan adanya peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) perusahaan asuransi menjadi perusahaan sendiri paling lambat akhir Oktober 2024, aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan OJK Nomor 67/POJK.05/2016. Pertumbuhan asuransi syariah pada beberapa tahun terakhir di Indonesia dari beberapa aspek dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Data Keuangan Asuransi Syariah (Miliar Rp)

| Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sep-2019 |
|------------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Aset | 26.519 | 33.244 | 40.520 | 41.959 | 44.411 |
| Investasi | 23.070 | 28.807 | 35.310 | 36.969 | 38.994 |
| Kontribusi | 10.489 | 12.028 | 13.995 | 15.369 | 11.744 |
| Klaim | 3.342 | 4.336 | 4.948 | 7.583 | 7.338 |

Sumber: Data statistik IKNB Syariah – Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Data keuangan asuransi syariah diatas menunjukkan peningkatan positif dalam perkembangan industry asuransi syariah di Indonesia, dari sisi aset kenaikan dari tahun 2015 hingga september 2019 jika dinilai rata-ratanya aset perusahaan asuransi syariah naik sebesar 14.16% dan rata-rata kenaikan nilai investasinya naik sebesar 14.40%.

Tabel 2. Data Industri Asuransi Syariah September 2019

| Keterangan | Industri Syariah (Full Fledged) | Unit Usaha Syariah | Aset (Miliar RP) |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Asuransi Syariah | 13 | 49 | 44.411 |
| Asuransi Jiwa Syariah | 7 | 23 | 4.626 |
| Asuransi Umum Syariah | 5 | 24 | 2.541 |
| Reasuransi Syariah | 1 | 2 | 1.952 |

Sumber: Data statistik IKNB Syariah – Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Selain data keuangan, dapat pula dilihat dari peningkatan jumlah perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia. Hingga saat ini perusahaan asuransi syariah *full fledged* ada 13 emiten yang terdiri dari 7 perusahaan asuransi jiwa syariah, 5 perusahaan asuransi umum syariah dan 1 perusahaan reasuransi syariah. Sedangkan untuk perusahaan unit usaha asuransi syariah ada 50 emiten, terdiri dari 23 perusahaan asuransi jiwa unit usaha syariah, 25 perusahaan asuransi umum unit usaha syariah dan 2 perusahaan unit usaha reasuransi syariah.

Di Indonesia sendiri asuransi syariah sudah berjalan selama 22 tahun, pertama kali diresmikannya PT. Takaful Keluarga sebagai awal mula lahirnya asuransi berasas syariah yaitu pada tahun 1994. Usia tersebut masih tergolong sangat muda jika dibandingkan dengan dengan asuransi konvensional yang sudah beroperasi sejak tahun 1912 dengan berdirinya asuransi Bumiputera. Pertumbuhan asuransi syariah dinilai positif dan masih mempunyai peluang pasar yang cukup besar (Ichsan, Syarif, & Jakarta, 2016). Mengingat Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi industry asuransi syariah dalam memasarkan produknya di pasar muslim terbesar, namun demikian pasar asuransi syariah tidak hanya sebatas umat muslim saja, namun juga bagi non muslim.

Perkembangan positif asuransi syariah di Indonesia, jika dibanding dengan negara-negara lain masih dapat dibilang kurang, hal ini karena minat masyarakat di Indonesia akan pemahaman dan literasi pentingnya berasuransi masih kurang, keberhasilan perusahaan asuransi syariah di Indonesia yang ada tidak bisa luput dari peran serta masyarakat yang memiliki kesadaran yang cukup tinggi akan pentingnya berasuransi.

2. TELAAH TEORITIS

Keputusan masyarakat dalam memilih untuk berasuransi syariah, tidak lepas dari perkembangan industri keuangan syariah sendiri, dari beberapa tahun belakang, industri keuangan berlabel syariah mulai marak bermunculan, baik bank syariah, pembiayaan syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Hal tersebut menunjukkan bisnis pada industry keuangan syariah sedang banyak diminati dan menjanjikan. Indonesia sendiri merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, dengan demikian Indonesia merupakan ladang pasar yang sangat bagi industri-industri bisnis berlabel syariah.

Bagi umat Islam sendiri, merupakan kewajiban untuk patuh pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh syariah, termasuk dalam berasuransi, dimana setiap transaksi atau akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariah. Asuransi konvensional mengandung bentuk-bentuk transaksi yang dilarang oleh syariah,

Dalam Dewi (2007) dijelaskan diantara praktek-praktek yang dilarang oleh syariah pada asuransi konvensional yang pertama adalah adanya gharar (ketidak jelasan), kontrak atau transaksi pada asuransi konvensional adalah dengan akad tabadduli, yaitu akad pertukaran antara premi dengan pertanggungan, karenanya gharar dapat terjadi pada ketidak jelasan ada atau tidaknya klaim yang akan diperoleh nasabah dari perusahaan asuransi. Selain itu dalam asuransi konvensional adanya maysir atau gambling, terlihat apabila selama masa perjanjian peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka peserta tidak berhak mendapatkan apa-apa termasuk termasuk premi yang disetornya. Sedangkan, keuntungan diperoleh ketika peserta yang belum lama menjadi anggota (jumlah premi yang disetor sedikit) menerima dana pembayaran klaim yang jauh lebih besar. Praktek lain yang dilarang syariah pada asuransi konvensional adalah adanya riba, Dalam cara perusahaan asuransi konvensional melakukan usaha dan investasi dimana meminjamkan dana premi yang terkumpul atas dasar bunga.

Praktek atau transaksi asuransi konvensional yang terlarang dalam syariah di atas telah dihilangkan pada asuransi syariah, dimana pada akadnya dirubah menjadi taawuni atau tolong-menolong yang tergolong pada akad tabarru', sehingga gharar yang terjadi tidak berdampak pada akad tersebut. Dengan demikian maisir atau gambling juga hilang dan konsep pada asuransi syariah, dana premi (kontribusi) yang terkumpul diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil, terutama mudharabah dan musyarakah.

Dalam memutuskan sesuatu, seseorang dapat dipengaruhi dua macam faktor utama, faktor internal yaitu faktor yang terkait dengan kebutuhan psikologis, latar belakang pendidikan, alat indera, kepribadian dan pengalaman penerimaan diri serta keadaan individu pada waktu tertentu (Gibson, Ivancevich, & Donnelly, 1989). Untuk faktor internal ini sub variable yang digunakan adalah pengetahuan tentang syariah. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, faktor ini digunakan untuk obyek yang dipersepsikan atas orang atau keadaan, lingkungan, kekuatan rangsangan akan turut menentukan didasari atau tidaknya rangsangan tersebut. Untuk

faktor ini menggunakan sub variable produk, premi (kontribusi) dan promosi asuransi syariah.

2.1 SYARIAH

Kata syariah berasal dari dahasa Arab, syariah bentuk masdar dari **شرع** yang memiliki arti jalan ke sebuah mata air. sedangkan secara terminology syariah adalah sesuatu yang ditentukan oleh Allah SWT untuk hambanya dari hukum-hukum yang diturunkan melalui nabi Muhammad SAW, baik dalam hukum-hukum aqidah maupun hukum-hukum muamalah untuk kebahagiaan mereka baik di dunia maupun di akhirat (Al-Sa'di, 2013). Syariah merupakan sebuah nilai tersendiri dalam menaati ajaran agama. Jalaluddin (2007) menjelaskan bahwa agama merupakan bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap sesuatu yang bersifat supranatural (adikodrati), hal ini membuat keyakinan tersebut menyertai manusia dalam ruang lingkup kehidupan yang luas. Agama menyertai seluruh nilai kehidupan secara pribadi dan sosial bermasyarakat. Selain itu agama juga akan memberikan dampak bagi kehidupan sehari-hari. Agama berpengaruh motivasi dan mendorong individu untuk melakukan sesuatu, agama dengan landasan keyakinan dinilai memiliki unsur kesucian yang berpengaruh pada ketaatan, keterkaitan ini akan memberi pengaruh diri seseorang untuk berbuat sesuatu, mempertimbangkan sesuatu dan dalam memutuskan sesuatu.

2.2 PRODUK

Kotler & Keller (2016) menjelaskan produk merupakan suatu benda maupun jasa yang ditawarkan ke pasar yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Produk ialah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk didalamnya masalah harga, nama baik perusahaan, dan pelayanan perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan. Dalam penelitian Sofhian (2017) menerangkan bahwa kualitas produk dan religiusitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah memilih asuransi syariah, jika kualitas produk ditingkatkan atau diturunkan sebesar satu satuan maka keputusan nasabah memilih asuransi syariah akan meningkat atau menurun sesuai dengan produk dan tingkat religiusitas dalam berasuransi syariah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marwa, Sumarwan, & Nurmalina, (2015) . Hasil penelitian menunjukkan bahwa setidaknya ada lima bauran pemasaran memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian asuransi jiwa, dan bauran produk merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian asuransi jiwa.

2.3 PREMI (KONTRIBUSI)

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mendefinisikan pengertian premi adalah “sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat”. Lebih lanjut, pengertian kontribusi dalam undang-undang tersebut adalah “sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari dana *tabarru'* dan/atau dana investasi peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat”. premi asuransi adalah uang pertanggungan merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan akibat timbulnya perjanjian atas pemindahan risiko dari tertanggung kepada penanggung (Nopriyansyah, 2016).

Dalam asuransi syariah, premi lebih dikenal sebagai kontribusi. Asuransi syariah mempunyai perbedaan yang mencolok pada pengelolaan dana kontribusi tersebut, dimana setiap peserta asuransi sejak awal mempunyai semangat saling tolong menolong dan melindungi satu sama lain antar peserta, dana kontribusi yang disetorkan akan disisihkan sebagiannya sebagai dana kebijakan yang disebut *tabarru'*. Hal ini yang membuatnya berbeda dengan asuransi konvensional, menurut Soemitra (2009) sistem asuransi syariah ini tidak menggunakan pengalihan risiko (*risk transfer*) dimana perusahaan asuransi harus membayar kontribusi peserta, tetapi menggunakan sistem pembagian risiko (*risk sharing*) dimana peserta satu dan lainnya saling menanggung jika salah satu dari peserta mendapat musibah.

2.4 PROMOSI

Pengertian promosi dalam Kotler & Armstrong, (2013) “*promotion means activities that communicate the merits of the product and persuade target customers to buy it*. Artinya promosi merupakan kegiatan yang mengkomunikasikan manfaat dari sebuah produk dan membujuk target konsumen untuk membeli produk tersebut”, sedangkan Cummins (1991) mendefinisikan “promosi sebagai serangkaian teknik yang digunakan untuk mencapai sasaran penjualan atau pemasaran dengan menggunakan biaya yang efektif, dengan memberikan nilai tambah pada produk atau jasa baik kepada perantara atau pemakai langsung. Biasanya tidak dibatasi dalam jangka waktu tertentu”.

Faktor-faktor masyarakat dalam memilih untuk memutuskan sesuatu mempunyai beberapa aspek penting pertimbangan, termasuk dalam memilih untuk berasuransi syariah. Fitria, (2014) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa faktor syariah, produk, harga, promosi, lokasi, sumber daya manusia, proses, dan bukti fisik secara bersama-sama berpengaruh terhadap loyalitas nasabah asuransi syariah.

Pengertian asuransi syariah sendiri mengandung arti menanggung suatu kerugian yang terjadi. Sementara dalam bahasa Arab, asuransi terambil dari kata **أَمِنَ**, yang berarti aman, yaitu berkenaan dengan ketenangan jiwa

dan meniadakan rasa takut. Menurut Sula (2004) yaitu asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.

Dari pengertian di atas, sebenarnya perbedaan utama dari asuransi syariah dan konvensional terletak pada tujuan dan landasan operasional. Dari sisi tujuan, asuransi syariah bertujuan saling menolong (*ta'âwuni*) sedangkan dalam asuransi konvensional tujuannya penggantian (*tabâduli*). Pada aspek landasan operasional, asuransi konvensional melandaskan pada peraturan perundangan, sementara asuransi syariah melandaskan pada peraturan perundangan dan ketentuan syariah (Maksum, 2011).

Dalam hal ketentuan syariah, asuransi syariah dibatasi dalam kegiatannya oleh larangan-larangan syariah, di antaranya larangan mempraktikkan riba dalam bentuk apapun, menghindarkan praktik perjudian, ketidakpastian, dan ketidakjelasan (*maysir, gharar, jahâlah*), dan berinvestasi dalam bidang yang halal. Selain itu, dalam konteks Indonesia, asuransi syariah wajib memiliki dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi kesesuaian praktik perusahaan asuransi dengan ketentuan syariah.

Menurut Saharuddin, (2014) Pada perusahaan asuransi syariah hal yang perlu benar-benar diperhatikan adalah amanah dan kejujuran, karena tujuan utama yang ingin dicapai dalam bisnis industri perusahaan dalam mencari keuntungan adalah saling tolong menolong untuk kebaikan dan ketaqwaan. Bagaimana pun juga, perusahaan asuransi syariah adalah lembaga bisnis bukan bank yang beroperasi dalam bidang produk jasa dan pengelolaan risiko yang menawarkan janji-janji adanya mitigasi risiko dan ganti rugi.

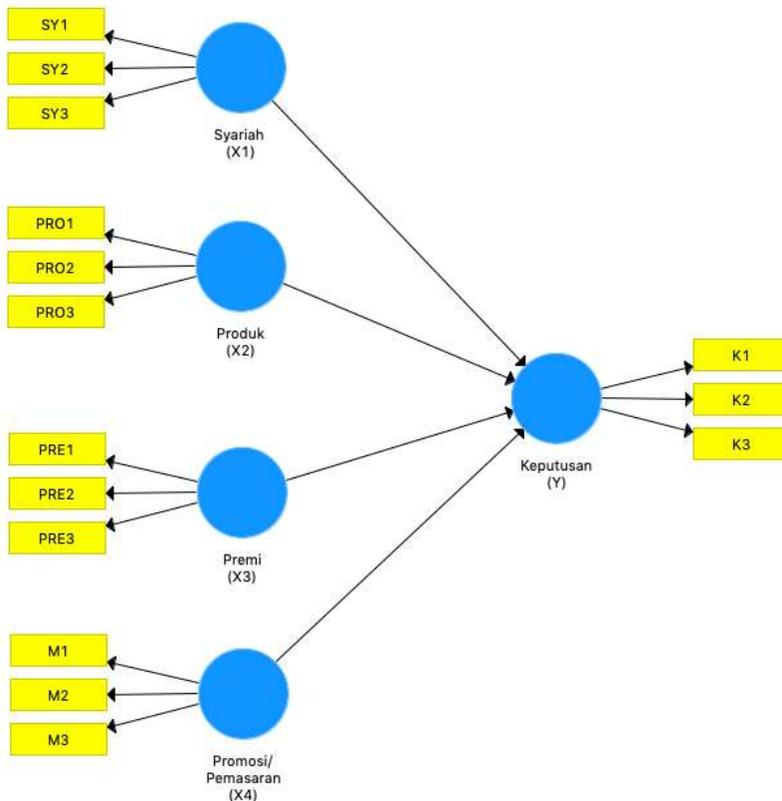
3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah analisa kuantitatif. Untuk populasi dan sampel adalah masyarakat Jabodetabek Metode ini menggunakan Teknik Convenience Sampling dikarenakan dapat menentukan sampel berdasarkan kebetulan saja, anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden dijadikan sampel (Suliyanto, 2018). Dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat Jabodetabek. Format kuesioner yang digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama berisi tentang informasi identitas profil responden, Sedangkan bagian kedua dari kuesioner berkaitan dari faktor - faktor yang yang mempengaruhi dalam memutuskan untuk berasuransi syariah. Untuk analisis data menggunakan PLS (*Partial Least Square*). suatu tehnik statistik multivariat yang bisa menangani banyak variabel respon dan variabel eksplanatori sekaligus. PLS merupakan alternatif yang baik untuk metode analisis regresi berganda dan regresi komponen utama karena metode PLS bersifat lebih robust, artinya parameter model tidak banyak berubah ketika sampel baru diambil dari total populasi.

Pada penelitian ini akan dilakukan pengujian hipotesis menggunakan *software Partial Least Square (SmartPLS) 3.0*. metode alternatif analisis dengan Structural Equation Modelling (SEM) yang berbasis variance. Keunggulan metode ini adalah tidak memerlukan asumsi dan dapat diestimasi dengan jumlah sampel yang relatif kecil. Model structural penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 menjelaskan bahwa seluruh konstruk diukur dengan 3 buah indikator. konstruk keputusan (K) diukur dengan 3 indikator, yaitu K1, K2 dan K3. Konstruk syariah (SY), diukur dengan indikator SY1, SY2 dan SY3. Konstruk produk (PRO) diukur dengan indokator PRO1, PRO2, dan PRO3. Konstruk premi/kontribusi (PRE) diukur dengan PRE1, PRE2, dan PRE 3. Demikian dengan konstruk promosi, diukur dengan indokator M1, M2 dan M3. Arah panah antara indikator dengan konstruk laten adalah menuju indikator yang menunjukkan bahwa penelitian menggunakan indikator reflektif yang relatif sesuai untuk mengukur persepsi. Hubungan yang akan diteliti (hipotesis) dilambangkan dengan anak panah antara konstruk.

Gambar 1. Hasil model output PLS



4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 PENGUJIAN MODEL

4.1.1 Uji Validitas

Suatu indikator dinyatakan valid jika mempunyai loading factor di atas 0,5 terhadap konstruk yang dituju. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa semua nilai *loading factor* diatas 0,5, hal tersebut Berarti menunjukkan indikator yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah valid. Nilai paling kecil adalah sebesar 0.592 untuk indikator PRO1. Berarti indikator yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah valid atau telah memenuhi *convergent validity*.

Tabel 3. Output Loading Factor

| | Keputusan (Y) | Premi (X3) | Produk (X2) | Promosi/Pemasaran (X4) | Syariah (X1) |
|------|------------------|---------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| K1 | 0.851 | | | | |
| K2 | 0.744 | | | | |
| K3 | 0.775 | | | | |
| M1 | | | | 0.756 | |
| M2 | | | | 0.793 | |
| M3 | | | | 0.945 | |
| PRE1 | | 0.887 | | | |
| PRE2 | | 0.886 | | | |
| PRE3 | | 0.887 | | | |
| PRO1 | | | 0.592 | | |
| PRO2 | | | 0.890 | | |
| PRO3 | | | 0.905 | | |
| SY1 | | | | | 0.811 |
| SY2 | | | | | 0.770 |
| SY3 | | | | | 0.821 |

Sumber: Data diolah

Tabel 4 menunjukan nilai AVE diatas 0,5 untuk semua konstruk yang terdapat pada model penelitian. Nilai terendah AVE adalah sebesar 0.641 pada konstruk Keputusan. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk Keputusan, Premi/Kontribusi, Produk, Promosi dan Syariah adalah valid.

4.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability* dari indikator yang mengukur konstruk. Hasil *composite reliability* akan menunjukkan nilai yang memuaskan jika di atas 0,7, dan bisa diperkuat dengan Cronbach's Alpha.

Tabel 4. Uji Validitas

| | AVE |
|-----------------------|-------|
| Keputusan (Y) | 0.641 |
| Premi/Kontribusi (X3) | 0.740 |
| Produk (X2) | 0.654 |
| Promosi (X4) | 0.702 |
| Syariah (X1) | 0.642 |

Sumber: Data diolah

Nilai pada Tabel 5 menunjukkan bahwa seluruh konstruk menunjukkan nilai composite reliability $> 0,7$, hal ini berarti bahwa nilai semua konstruk pada model yang diestimasi memenuhi kriteria *discriminant validity*.

Tabel 5. Composite Reliability

| | Composite Reliability |
|-----------------------|-----------------------|
| Keputusan (Y) | 0.843 |
| Premi/Kontribusi (X3) | 0.895 |
| Produk (X2) | 0.846 |
| Promosi (X4) | 0.875 |
| Syariah (X1) | 0.843 |

Sumber: Data diolah

Nilai yang disarankan adalah di atas 0,6 dan pada Tabel 6 menunjukkan nilai Cronbach alpha paling rendah adalah sebesar 0,727 pada konstruk syariah.

Tabel 6. Cronbach Alpha

| | Cronbach Alpha |
|-----------------------|----------------|
| Keputusan (Y) | 0.744 |
| Premi/Kontribusi (X3) | 0.826 |
| Produk (X2) | 0.749 |
| Promosi (X4) | 0.809 |
| Syariah (X1) | 0.727 |

Sumber: Data diolah

4.1.3 Uji R SQUARE

Berdasarkan

Tabel 7, *R-Square Adjusted* adalah sebesar 0,305 dengan demikian menunjukkan pengaruh premi/kontribusi, produk, promosi dan syariah terhadap keputusan sebesar 30,5 % dan sisanya sebesar 69,5% dipengaruhi oleh faktor lain.

Tabel 7. Nilai R Square dan R Square Adjusted

| | R Square | R Square Adjusted |
|---------------|----------|-------------------|
| Keputusan (Y) | 0.333 | 0.305 |

Sumber: data diolah

4.1.4 Uji Hipotesis

Tabel 8 menunjukkan bahwa hubungan antara PRE dengan K adalah tidak signifikan dengan T-statistik sebesar 0,618 ($< 1,96$). Nilai original sample estimate adalah positif yaitu sebesar 0,069 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara PRE dengan K adalah positif. Dengan demikian hipotesis H1 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “Premi berpengaruh terhadap Keputusan” diterima.

Tabel 8. Hasil Nilai Koefisien Analisis Jalur

| | Original Sample (O) | Sample Mean (M) | Standard Deviation (STDEV) | T Statistics (O /STDEV) | P Values |
|-------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|----------|
| Premi/Kontribusi -> Keputusan | 0.069 | 0.066 | 0.112 | 0.618 | 0.537 |
| Produk-> Keputusan | 0.306 | 0.297 | 0.105 | 2.905 | 0.004 |
| Promosi -> Keputusan | -0.037 | -0.022 | 0.144 | 0.256 | 0.798 |
| Syariah -> Keputusan | 0.401 | 0.413 | 0.075 | 5.356 | 0.000 |

Sumber: Data diolah

Hubungan antara PRO dengan K adalah signifikan dengan T-statistik sebesar 2,905 ($> 1,96$). Nilai original sample estimate adalah positif yaitu sebesar 0,306 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara PRO dengan K adalah positif. Dengan demikian hipotesis H2 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “Produk berpengaruh terhadap Keputusan” diterima.

Hubungan antara M dengan K adalah tidak signifikan dengan T-statistik sebesar -0,256 ($< 1,96$). Nilai original sample estimate adalah negatif yaitu sebesar -0,037 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara M dengan K adalah negatif. Dengan demikian hipotesis H3 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “Promosi berpengaruh terhadap Keputusan” ditolak.

Hubungan antara SY dengan K adalah signifikan dengan T-statistik sebesar 5,356 ($> 1,96$). Nilai original sample estimate adalah positif yaitu sebesar 0,401 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara SY dengan K adalah positif. Dengan demikian hipotesis H4 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “Syariah berpengaruh terhadap Keputusan” diterima.

4.2 PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa premi/kontribusi tidak mempunyai pengaruh signifikan dengan keputusan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai T-statistik sebesar 0,618 ($< 1,96$). Mempunyai Nilai *original sample estimate* adalah positif yaitu sebesar 0,069 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara premi dengan keputusan adalah positif. Kesimpulan dari data tersebut bahwa premi/kontribusi tidak mempunyai kontribusi signifikan dengan keputusan masyarakat dalam memutuskan untuk berasuransi syariah. Hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian (Kurniawaty, 2017) yang dilakukan pada asuransi konvensional, menyatakan bahwa tarif premi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli.

Besaran tarif premi atau kontribusi seyogyanya mempunyai pengaruh terhadap minat atau keputusan masyarakat dalam berasuransi syariah, namun jika dilihat dalam penelitian ini menunjukkan belum adanya tarif atau besaran kontribusi yang kompetitif jika dibandingkan dengan asuransi konvensional, sehingga premi (kontribusi) belum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan masyarakat dalam memilih asuransi syariah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kenaikan atau penurunan tarif premi (kontribusi) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menentukan minat calon peserta asuransi dalam berasuransi syariah.

4.2.1 Produk Terhadap Keputusan

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa produk mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan. Hal ini ditunjukkan dengan dengan nilai T-statistik sebesar 2,905 ($> 1,96$). Nilai *original sample estimate* adalah positif yaitu sebesar 0,306 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara produk dengan keputusan adalah positif. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa kualitas produk mempengaruhi keputusan masyarakat dalam berasuransi syariah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan di Prudential Life Ansurance Cabang Kota Gorontalo oleh Sofhian dan Suleman (2017), menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah memilih asuransi syariah.

Setiap peningkatan baik pada sisi kualitas maupun kuantitas produk oleh perusahaan asuransi syariah, maka mempunyai 30,6% pengaruh yang signifikan terhadap calon nasabah dalam memutuskan untuk berasuransi syariah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin tinggi kualitas produk yang ditawarkan maka semakin besar minat masyarakat dalam berasuransi syariah.

4.2.2 Promosi Terhadap Keputusan

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa promosi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai T-statistik sebesar 0,256 ($< 1,96$). Nilai *original sample estimate* adalah negatif yaitu sebesar -0,037 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara promosi

dengan keputusan adalah negatif. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa promosi belum mempunyai pengaruh terhadap keputusan masyarakat dalam berasuransi syariah, dimana bentuk promosi atau pemasaran yang ditawarkan kurang mempunyai peran atau andil khusus dalam keputusan masyarakat untuk mengikuti asuransi syariah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso, (2016) pada PT Takaful Cabang Gedong Kuning, penelitian ini menyatakan bahwa promosi tidak berpengaruh terhadap permintaan asuransi syariah, hal ini dikarenakan promosi yang dilakukan perusahaan asuransi syariah sangat terbatas pada *personal selling*, yang terdiri dari interaksi pribadi dengan pelanggan dan calon pelanggan untuk menghasilkan pelanggan dan menjaga hubungan pelanggan. Selain itu salah satu kelemahan *personal selling* dalam promosi adalah memerlukan waktu yang lama serta membutuhkan biaya yang relatif besar.

4.2.3 Syariah Terhadap Keputusan

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa syariah mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan. Hal ini ditunjukkan dengan T-statistik sebesar 5,356 ($> 1,96$). Nilai *original sample estimate* adalah positif yaitu sebesar 0,401 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara syariah dengan keputusan adalah positif. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman tentang kesyariahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat dalam mengambil keputusan dalam berasuransi syariah. Pemahaman tentang syariah memang menjadi salah satu faktor terkuat sebagai umat muslim yang wajib mengikuti atau memperhatikan peraturan-peraturan dalam bermuamalah, termasuk dalam memutuskan untuk berasuransi syariah.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Mohamad Abdul Hamid, (2009), Akhter & Hussain, (2012) dan (Schmidt, n.d.). Seseorang yang faham ilmu agama (syariah) dan mengamalkannya dengan ikhlas maka ia akan memutuskan memilih sesuatu yang diperbolehkan oleh syariah dan menjauhi sesuatu yang dilarang syariah, tentu hal tersebut untuk menjaga keimanannya dalam mengamalkan syariah.

Dari hasil penelitian ini dapat diambil pengertian bahwa pengaruh masyarakat dalam memilih untuk berasuransi syariah sangat dipengaruhi oleh kesyariahan itu sendiri, dimana masyarakat tersadarkan akan pentingnya bermuamalah sesuai dengan nilai-nilai syariah atas dasar keimanan yang dianut. Dengan demikian peningkatan branding kesyariahan baik terhadap perusahaan asuransi maupun terhadap produk-produk asuransi yang ditawarkannya, maka akan sangat mempengaruhi masyarakat dalam berasuransi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis *Partial Least Square* (PLS) dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat partisipasi atau keputusan masyarakat

di Jabodetabek dilihat dari indikator premi/kontribusi dan promosi masih kurang mempunyai pengaruh, hal ini dilihat karena kurang menonjolnya perusahaan asuransi syariah dalam variasi premi/kontribusi untuk menyentuh pada kalangan mikro dan juga pemasaran yang masih menggunakan keagenan sebagai pemasar, sehingga tidak ada pembanding dengan konvensional. Sedangkan untuk indikator produk dan syariah, sudah cukup baik diterima atau mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan masyarakat dalam berasuransi syariah, karena dari kedua sisi tersebut memang mempunyai karakteristik tersendiri bagi asuransi syariah. Diharapkan Untuk perusahaan asuransi syariah harus lebih mensosialisasikan dan mempunyai aneka pilihan dalam menentukan jumlah premi/kontribusi asuransi syariah dengan menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat untuk menjadi peserta asuransi syariah.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Akhter, W., & Hussain, T. (2012). Takāful standards and customer perceptions affecting takāful practices in Pakistan: a survey. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://doi.org/10.1108/17538391211255214>
- Al-Sa'di, I. bin A. (2013). *منه المستشرقين وموقف الإسلامية الأمة تميز في دراسات*.pdf. Qatar: Wizarah Awqaf wa Su'un Islamiyah.
- Cummins, J. (1991). *Promosi Penjualan*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Dewan Syariah Nasional (DSN), M. U. I. (2001). *Fatwa Dewan Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*. Jakarta.
- Dewi, G. (2007). *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fitria, I. (2014). *Pengaruh Penerapan Nilai Syariah dan Bauran Pemasaran Jasa Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Bumiputera Syariah Cabang Yogyakarta*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., & Donnelly, J. H. (1989). *Organisasi : perilaku, struktur, proses*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Ichsan, N., Syarif, U., & Jakarta, H. (2016). Peluang Dan Tantangan Inovasi Produk Asuransi Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 131–156.
- Jalaluddin, & Idi, A. (2007). *Filsafat Pendidikan: Manusia, Filsafat dan Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2013). *Principles of Marketing 15th Global Edition*. Pearson Education Limited.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management. Global Edition*

(5th ed.). <https://doi.org/10.1080/08911760903022556>

- Kurniawaty, E. (2017). Pengaruh Citra Perusahaan dan Tarif Premi Terhadap Minat Beli Yang Berdampak Pada Kepuasan Pelanggan di PT Asuransi Cigna Jakarta. *Jurnal KREATIF: Pemasaran, Sumberdaya Manusia Dan Keuangan, Vol. 5 (1)*, 16.
- Maksum, M. (2011). Pertumbuhan Asuransi Syariah di Dunia dan Indonesia. *Jurnal Al-Iqtishod, III (1)*, 37.
- Marwa, S., Sumarwan, U., & Nurmalina, R. (2015). Bauran Pemasaran Memengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Pembelian Asuransi Jiwa Individu. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen, 7(3)*, 190.
- Mohamad Abdul Hamid, M. S. O. (2009). A study on the level of knowledge and understanding among muslims towards the concepts, Arabic and shariah terms in islamic insurance (Takaful). *European Journal of Social Sciences*.
- Nopriyansyah, W. (2016). *Asuransi Syariah, Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ridlwan, A. A. (2017). Asuransi Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah, 04*.
- Saharuddin, D. (2014). Asuransi Syariah dalam Praktek (Studi Analisis Terhadap Shariah Compliance). *ESENSI*. <https://doi.org/10.15408/ess.v4i3.2438>
- Santoso, H. (2016). *Pengaruh Promosi, Premi, Pendapatan Nasabah, dan Tingkat Pendidikan Nasabah terhadap Permintaan Asuransi pada PT Takaful Cabang Gedong Kuning*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Schmidt, A. P. (n.d.). The Impact of Cognitive Style, Consumer Demographics and Cultural Values on The Acceptance of Islamic Insurance Products Among American Consumers. *International Journal of Bank Marketing, 37 (2)*.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sula, M. S. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General)*. Jakarta: Gema Insani.
- Suliyanto. (2018). *Metode Penelitian Bisnis Untuk Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*. Yogyakarta: Andi Offset.

PERBANDINGAN HISTORICAL COST DAN CURRENT COST SEBAGAI DASAR PENILAIAN ZAKAT PERBANKAN SYARIAH

Any Eliza dan Rahmat Fajar Ramdani

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung, 35131

Email: anyeliza@radenintan.ac.id dan rahmatfajar@radenintan.ac.id

ABSTRACT

This research aims to count and analyze the income of Sharia Commercial Bank based on current cost measurement and also test statistically the significancy of differences between the two measurements basis (historical cost and current cost). This research uses financial statements for the year 2018 of 12 Sharia Commercial Banks. The data is collected by using documentation method and literature study method. Analysis of data is conducted by using descriptive analysis and paired t-test to answer the hypothesis proposed in this research. Findings from the reserach shows that generally, income before zakah and tax of 12 Sharia Commercial Banks counted by using current cost measurement is higher than income before zakah and tax counted by using historical cost measurement. Although the result is not significant statistically, the differences are valuable and can affect the sum of zakat should be paid.

Keywords: historical cost, current cost, zakat, sharia commercial banks

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan menganalisis laba Bank Umum Syariah di Indonesia dengan menggunakan dasar pengukuran current cost serta menguji secara statistik apakah terdapat perbedaan signifikan antara laba yang dihitung berdasarkan dasar pengukuran historical cost dengan current cost. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan konsolidasian 12 Bank Umum Syariah tahun 2018. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif serta uji statistik berupa uji t dua sampel berpasangan (paired t-test) untuk membuktikan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pengukuran current cost menghasilkan nilai laba sebelum zakat dan pajak yang lebih tinggi dibandingkan dasar pengukuran historical cost. Meskipun hasilnya tidak signifikan secara statistik, perbedaannya sangat berharga dan dapat mempengaruhi jumlah zakat yang harus dibayar

Kata kunci: historical cost, current cost, zakat, Bank Umum Syariah

1. PENDAHULUAN

Akuntansi memainkan peranan yang sangat penting bagi perhitungan zakat perusahaan. Melalui *output* atau proses akuntansi berupa laporan keuangan perusahaan, maka diperoleh informasi yang nantinya dijadikan dasar untuk menghitung kewajiban zakat. Akuntansi berkontribusi dalam proses perhitungan zakat yang tepat, seperti zakat *maal*, zakat penghasilan, zakat profesi, zakat perdagangan, zakat laba, dan sebagainya. Syafei (2008) sebagaimana dikutip Wasilah (2013) menyatakan bahwa zakat perusahaan didasarkan pada prinsip keadilan dan hasil dari *ijtihad* para ahli fikih sehingga jenis zakat tersebut relatif sulit ditemukan di kitab fikih klasik. Zakat perusahaan oleh para ulama kontemporer dianalogikan dengan zakat perdagangan, dimana kegiatan utamanya adalah kegiatan *trading* atau perdagangan.

Pengungkapan zakat yang harus dibayarkan oleh perusahaan merupakan tujuan dari akuntansi syariah (Gambling & Karim, 1991). Hal tersebut selaras dengan pernyataan YAYA (2003) bahwa prinsip pertanggungjawaban adalah hal yang sangat penting dalam akuntansi. Sementara dalam ruang lingkup akuntansi Islam, pengungkapan zakat menjadi tujuan utama. Pengungkapan zakat tidak ditemukan dalam domain akuntansi konvensional. Dalam akuntansi Islam, informasi akuntansi yang disajikan untuk para pemangku kepentingan menjadi lebih luas karena tidak hanya mencakup data keuangan berupa laporan keuangan, tetapi juga mencakup informasi tentang aktivitas atau kegiatan perusahaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah serta pembayaran zakat. Mengingat informasi dalam laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan perhitungan zakat perusahaan, maka hal selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah apa dasar pengukuran yang akan digunakan untuk menilai aset yang akan menjadi subjek zakat: *historical cost* atau *current cost*.

Dasar pengukuran unsur laporan keuangan yang pada umumnya digunakan oleh perusahaan adalah biaya perolehan (*historical cost*). Jika dasar pengukuran biaya perolehan (*historical cost*) digunakan, maka aset akan dicatat sebesar kas atau setara kas yang dibayarkan atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan; sementara kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban (Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI, 2016). Dasar pengukuran Biaya perolehan (*historical cost*) mudah untuk diterapkan karena dapat diverifikasi/teruji dan bersifat objektif berdasarkan saat perolehannya. Pengukuran dengan metode ini juga memberikan informasi yang bermanfaat untuk memprediksi masa depan bagi para pengambil keputusan seperti para manajer dan investor (Harahap, 2011). Oleh karena itu, pengukuran dengan biaya perolehan (*historical cost*) masih diperkenankan oleh standar akuntansi keuangan yang berlaku saat ini.

Namun demikian, banyak kritik diberikan atas konsep pengukuran menggunakan biaya perolehan ini terkait dengan adanya perubahan dalam kemampuan daya beli dan perubahan harga. Biaya perolehan (*historical cost*)

mengasumsikan bahwa daya beli uang atau unit moneter bersifat stabil sehingga perubahan nilai dalam unit moneter adalah tidak material (Swardjono, 2011). Lebih lanjut Harahap (2011) menambahkan bahwa *stable monetary unit* kenyataannya tidak ada. Tingkat inflasi setiap negara berbeda-beda dan tidak ada satupun negara di dunia ini yang memiliki nilai valuta stabil. Dengan demikian, inflasi berdampak terhadap relevansi penyajian laporan keuangan.

Pengukuran aset dan liabilitas yang menjadi dasar penentuan besaran zakat perusahaan dalam perspektif Islam lebih ditekankan pada penggunaan pengukuran nilai wajar (*fair value*) dibandingkan *historical cost*. Hal tersebut dikarenakan pengukuran *fair value* dapat menghasilkan informasi yang sesuai dengan kondisi saat ini (Pratiwi & Siswantoro, 2018). Pengukuran aset terkait perhitungan zakat merupakan hal penting dalam perspektif Islam serta merekomendasikan penilaian ulang (*re-value*) aset secara teratur; sistem akuntansi Islam pada umumnya menggunakan harga jual pasar (*market selling prices*) dan biaya historis untuk mengakomodasi kontrak transaksi dan pelaksanaan tanggung jawab sosial (Mirza & Baydoun, 2000). Jika dasar pengukuran *current cost* digunakan, maka zakat dihitung berdasarkan nilai kini dari aset yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW: “*measure based on the price today, then pay zakat*”, sebagaimana dikutip oleh Pratiwi & Siswantoro (2018).

Hasil penelitian Awang & Mokhtar (2012) tentang penilaian zakat perusahaan di Malaysia dengan menggunakan dasar pengukuran *current value* dan *historical cost* menunjukkan bahwa penggunaan dasar pengukuran *current value* menghasilkan zakat yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan dasar pengukuran *historical cost*. Hasil ini mendukung hipotesis sebelumnya yang menyatakan bahwa dasar pengukuran *historical cost* kurang tepat untuk dasar penilaian zakat, terutama dalam kondisi inflasi.

Hasil penelitian Pratiwi & Siswantoro (2018) menunjukkan bahwa dari 15 perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII), hanya sembilan perusahaan yang menggunakan *fair value* sebagai dasar pengukuran beberapa aset dan liabilitasnya. Penggunaan *fair values* sebagai dasar pengukuran aset dan liabilitas penting bagi perusahaan untuk menghitung zakat perusahaan. Sementara enam perusahaan lainnya menggunakan *historical cost* sebagai dasar pengukuran aset dan liabilitas.

Dasar pertimbangan penerapan dasar pengukuran *historical cost* adalah adanya anggapan bahwa tingginya nuansa *judgement*, terutama pada aset tertentu yang tidak memiliki pasar dan adanya tambahan biaya dalam rangka melakukan *appraisal* atas aset yang perusahaan miliki untuk dapat disajikan menggunakan *current cost*. Sementara di sisi lain, entitas syariah harus membayar zakat serta menyusun dan memublikasikan Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat sebagaimana diatur dalam PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Dengan demikian, dasar pengukuran unsur laporan keuangan menjadi sangat penting karena terkait dengan penilaian zakat perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan perhitungan laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia dengan menggunakan dasar

pengukuran *historical cost* dan *current cost* pada unsur-unsur dalam laporan keuangannya. Perbedaan dasar pengukuran unsur-unsur dalam laporan keuangan berimplikasi pada perbedaan laba perusahaan. Perbedaan tersebut dapat mempengaruhi nilai ekuitas dan *current asset* yang pada akhirnya menghasilkan perbedaan besaran zakat yang akan dibayar oleh bank syariah.

2. TELAAH TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 AKUNTANSI SYARIAH DAN ZAKAT PERUSAHAAN

Akuntansi syariah dapat didefinisikan sebagai proses akuntansi yang berfungsi untuk menghasilkan informasi yang tidak terbatas pada data keuangan, saja, tetapi juga informasi tentang aktivitas entitas yang berjalan sesuai dengan hukum-hukum Islam (ketentuan syariah) serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam, seperti adanya kewajiban untuk membayar zakat (Wasilah, 2013). Harahap (1997) sebagaimana dikutip Triyuwono (2012) menyatakan bahwa pengungkapan tentang kebenaran, keadilan, kepastian, keterbukaan, dan akuntabilitas atas transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan merupakan tujuan dari akuntansi syariah. Selain tujuan di atas, akuntansi syariah lebih berorientasi pada pengungkapan zakat yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, akuntansi memainkan peranan yang sangat penting untuk menghasilkan informasi yang nantinya dijadikan dasar untuk menghitung kewajiban zakat.

Tiga prinsip utama dalam akuntansi syariah adalah: (1) Prinsip pertanggungjawaban, dimana prinsip ini terkait dengan konsep amanah yang berarti bahwa manajemen perusahaan harus mampu mengamalkan ketentuan syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya; (2) Prinsip keadilan, yang dalam konteks akuntansi berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar, tanpa adanya *window dressing* sehingga tidak merugikan pihak lain; (3) Prinsip kebenaran, dimana prinsip ini dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi (Muhammad, 2005).

Muhammad (2003) menyebutkan bahwa paradigma dalam akuntansi syariah tidak hanya fokus pada peran akuntansi dalam penyediaan informasi ekonomi, dasar pengambilan keputusan, serta pelaporan pendapatan secara tepat, tetapi juga menunjukkan adanya perbedaan ideologi akuntansi, dimana pijakan utama dalam akuntansi syariah adalah: 1) mencari keridhoan Allah SWT, hal ini menjadi tujuan utama untuk mencapai keadilan sosio-ekonomi; 2) merealisasikan keuntungan bagi masyarakat, dengan cara memenuhi kewajiban kepada masyarakat; 3) mengejar kepentingan pribadi, dengan memenuhi kebutuhan diri sendiri. Pelaksanaan tiga aktivitas tersebut merupakan bagian dari ibadah dan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, serta hak individu.

Lebih lanjut Muhammad (2003) menyatakan bahwa tujuan utama akuntansi syariah adalah untuk menciptakan keadilan sosio-ekonomi (*al-falah*), yang diturunkan ke dalam aspek teknis maupun kemanusiaan. Dalam

akuntansi syariah, aspek teknis merujuk kepada konstruk akuntansi yang terkait dengan otoritas dan pelaksanaannya. Sementara konstruk terkait dengan pengukuran dan pengungkapan, serta prinsip-prinsip zakat, bebas bunga, transaksi bisnis yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum Islam. Konstruk akuntansi yang terkait dengan otoritas maupun pelaksanaannya didasarkan pada pemenuhan prinsip *taqwa*, pertanggungjawaban, serta kebenaran. Dengan demikian, perbedaan antara akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah tidak hanya terletak pada batasan tujuan, tetap juga terletak pada prinsip-prinsip dasarnya.

Zakat perusahaan merupakan zakat yang dikeluarkan oleh sebuah usaha yang dikelola sebagai sebuah kesatuan resmi; setiap perusahaan yang bergerak di bidang produksi (hasil industri/pabrikasi) dan jasa dapat menjadi wajib zakat (Mufraini, 2006). Manaf menyebutkan bahwa zakat tersebut dikeluarkan jika telah memenuhi beberapa persyaratan berikut (Wasilah, 2013):

1. Muslim sebagai pemilik mayoritas usaha
2. Jenis usaha halal
3. Aset/kekayaan perusahaan dapat dinilai
4. Aset/kekayaan perusahaan dapat berkembang
5. Aset/kekayaan minimal perusahaan setara dengan 85 gram emas

Nisab dan persentase zakat perusahaan yaitu senilai nisab emas dan perak 85 gram emas dan telah cukup *haul* (1 tahun *qomariah*). Sementarapersentase besaran zakat adalah 2,5% dari aset wajib zakat yang dimiliki perusahaan.

2.2 METODE PERHITUNGAN ZAKAT PERUSAHAAN

Metode perhitungan zakat perusahaan menurut pendapat para ulama adalah sebagai berikut (Syafei, 2008):

1. Menurut pendapat Qardhawi, zakat dikenakan atas aset/kekayaan perusahaan yang dipergunakan dalam rangka memperoleh laba. Zakat dikenakan atas aset lancar bersih (*net current asset*) sehingga zakat = *current asset - current liabilities*
2. Menurut pendapat El Badawi dan Sultan, zakat dikenakan atas pertumbuhan modal bersih, dengan kata lain zakat tidak dikenakan atas aset tetap, tetapi atas aset yang tumbuh atau berkembang (*growing capital*).
3. Menurut Lembaga Fatwa Arab Saudi, zakat dikenakan atas kekayaan bersih perusahaan.

Berdasarkan hasil studi kasus yang dilakukan oleh Awang & Mokhtar (2012) di Pusat Zakat Selangor (PZS), terdapat 2 pendekatan perhitungan zakat yang umumnya berlaku di Malaysia, yaitu *Growth Model (Urfiyyah)* dan *Working Capital Model (Syarr"iyyah)*. Berdasarkan pendekatan *working*

capital, maka perusahaan wajib membayar zakat tanpa melihat apakah perusahaan memperoleh laba bersih atau tidak. Selama perusahaan memiliki modal kerja (*working capital*) bersih atau dengan kata lain perusahaan memiliki *surplus assets* dan sudah memenuhi nisab serta haul, maka perusahaan wajib membayar zakat. Sementara AAOIFI (1998) melalui (*FAS Financial Accounting Standard* No 9 sebagaimana dikutip oleh Wasilah (2013) menyatakan dua metode perhitungan zakat perusahaan: pendekatan aset bersih (*net assets method*) dan pendekatan dana investasi (*invested fund method*).

Dua metode perhitungan zakat yang pada umumnya dipraktikkan di Indonesia, yaitu (Farhan & Triyuwono, 2012):

1. Zakat Perusahaan = 2,5% x laba bersih setelah pajak
2. Zakat Perusahaan = 2,5% x (Aset lancar – Utang lancar)

2.3 CURRENT COST SEBAGAI DASAR PENGUKURAN ZAKAT PERUSAHAAN

Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI (2016) melalui Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah menyebutkan bahwa unsur-unsur penyusun laporan keuangan terdiri atas aset, liabilitas/kewajiban, dana *syirkah* temporer, ekuitas, penghasilan, beban, serta hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer. Selain itu, terdapat pula komponen zakat dan dana kebajikan sebagai unsur laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Dasar pengukuran dari unsur-unsur laporan keuangan mencakup biaya perolehan (*historical cost*), biaya kini (*current cost*), nilai realisasi (*realizable/settlement value*).

Jika dasar pengukuran biaya perolehan (*historical cost*) digunakan, maka aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban (*obligation*), atau dalam keadaan tertentu (misalnya, pajak penghasilan), dalam jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal (Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI, 2016). Biaya perolehan (*historical cost*) merupakan dasar pengukuran yang umumnya digunakan oleh sebagian besar perusahaan, termasuk entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangannya. Alasan penggunaan dasar pengukuran ini adalah biaya perolehan (*historical cost*) mudah untuk diterapkan karena dapat diverifikasi dan bersifat objektif berdasarkan saat perolehannya. Pada saat laporan keuangan disusun menggunakan dasar pengukuran biaya perolehan, maka nilai yang digunakan adalah harga pada saat transaksi dan sebagai alat ukurnya digunakan satuan unit moneter.

Sementara jika dasar pengukuran biaya kini (*current cost*) digunakan, maka aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan (*undiscounted*) yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan

kewajiban (*obligation*) sekarang (Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI, 2016). Menurut dasar pengukuran ini, aset akan diakui sebesar nilai kini sehingga aset yang ada harus direvaluasi setiap periode. Nilainya akan berfluktuasi sesuai dengan kondisi pada periode pelaporan. Jika terjadi inflasi, maka nilai aset akan disesuaikan dengan keadaan tersebut. Hal ini menjadikan kualitas informasi laporan keuangan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan informasi menjadi lebih relevan dibandingkan dengan informasi yang dihasilkan dengan dasar pengukuran biaya perolehan.

Gambling dan Karim, Hamid, dan Sulaiman sebagaimana dikutip oleh (Wasilah, 2013) menyarankan penggunaan nilai kini (*current value*) dibandingkan biaya perolehan (*historical value*), terutamadalam rangka perhitungan harta yang akan dikenakan zakat. Hal serupa diperkuat oleh Qardhawi (2004) yang berpendapat bahwa penilaian zakat harus didasarkan pada saat zakat akan dikeluarkan. Dengan demikian, entitas syariah perlu mengadopsi model penilaian aset kena zakat yang selaras dengan prinsip syariah. Dengan kata lain, kebijakan akuntansi terkait zakat yang diadopsi sangat berbeda dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi perusahaan pada umumnya yang ditujukan untuk meminimalisir pajak (Ahmed, Bin Aiffin, Yousif Alabdullah, & Zuqebah, 2016).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum dikeluarkan zakatnya, harta wajib zakat harus dinilai ulang dengan harga pasar yang berlaku pada saat akan dikeluarkan zakatnya (*current cost*). Penggunaan *current cost accounting* sebagai dasar pengukuran unsurlaporan keuangan pada entitas syariah merupakan salah satu bentuk perluasan akuntabilitas/pertanggungjawaban perusahaan di ranah sosial serta dianggap memenuhi prinsip-prinsip keadilan Islam, terutama dalam menentukan zakat daripada penggunaan *historical cost* dalam neraca (Hartono, 2016).

Penggunaan dasar pengukuran yang berbeda pada unsur-unsur dalam laporan keuangan dapat berimplikasi pada perbedaan laba perusahaan. Perbedaan tersebut dapat mempengaruhi nilai ekuitas dan *current asset* yang pada akhirnya menghasilkan perbedaan besaran zakat yang akan dibayar oleh bank syariah. Untuk itu, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat perbedaan signifikan antara lababerdasarkan *current cost accounting* dengan laba berdasarkan *historical cost accounting*

H_a : Terdapat perbedaan signifikan antara laba menggunakan *current cost accounting* dengan laba berdasarkan *historical cost accounting*

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif dengan menggunakan alat analisis statistik untuk menguji hipotesis yang diajukan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan konsolidasian dari 12 Bank Umum Syariah tahun 2018 yang bersumber dari:

1. website resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/>
2. website resmi Bank Umum Syariah yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang memublikasikan laporan keuangan tahun 2018, yaitu sejumlah 14 bank. Berdasarkan teknik *purposive sampling*, terpilih 12 Bank Umum Syariah dengan kriteria: (1) Bank yang menggunakan dasar pengukuran biaya perolehan (*historical cost*) pada sebagian dan atau seluruh unsur-unsur dalam laporan keuangannya; (2) nilai buku aset tetap tidak sama dengan nol.

Data dikumpulkan dengan menggunakan metode: (1) dokumentasi, yaitu bersumber dari dokumentasi laporan keuangan konsolidasian Bank Umum Syariah untuk periode 31 Desember 2018; (2) Studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan informasi dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, hasil penelitian, artikel, dan sumber lainnya yang relevan dengan tema penelitian ini.

Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu:

1. Analisis statistika deskriptif, dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang perbedaan laba bank syariah berdasarkan penggunaan pengukuran *historical cost* dan *current cost* yang diperoleh masing – masing bank serta untuk mengetahui bank yang memiliki laba tertinggi dan juga terendah, melalui tampilan grafik maupun tabulasi.

Sebelum dilakukan perbandingan, maka akan dilakukan terlebih dahulu tahapan perhitungan profit nominal dari laporan keuangan Bank Umum Syariah menggunakan metode *current cost accounting* yang diadopsi dari Hameed (2000) sebagaimana dikutip oleh Sidik & Djazuli (2010) dengan beberapa penyesuaian dapat dilihat pada ilustrasi berikut:

PT ABC

| | |
|--------------------------------|--------------|
| <i>Profit nominal</i> | xxx |
| <i>Adjustment depreciation</i> | <u>xxx</u> |
| <i>Adjustment profit</i> | xxx |
| <i>Fixed asset used</i> | <u>(xxx)</u> |
| <i>Profit CVA</i> | xxx |

Berdasarkan perhitungan di atas, profit atau laba yang dihasilkan oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap *current aset* sehingga profit yang ada harus disesuaikan dengan menggunakan metode *current cost accounting* dan beberapa penyesuaian. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. profit nominal atau dalam laporan laba rugi komprehensif disebut sebagai laba sebelum zakat dan pajak penghasilan;

- b. beban depresiasi yang telah dikurangkan pada laporan laba rugi harus ditambahkan karena pembebanan depresiasi dinilai berdasarkan *historical cost accounting* sehingga perlu disesuaikan;
- c. sebagai konsekuensi dari penambahan beban depresiasi, maka profit yang telah disesuaikan dikurangi dengan penggunaan *fixed asset* dengan menggunakan *current cost accounting* (sebagai ganti beban depresiasi).

Penggunaan aset tetap (*fixed asset*) akan dihitung berdasarkan *current cost accounting*. Oleh karena itu, akan digunakan Indeks Harga Konsumen (*Consumer Price Index*) sebagai faktor konversi akibat adanya inflasi sebagaimana diadopsi dari penelitian Sidik & Djazuli (2010):

$$\text{Penggunaan Fixed Asset} = \sum_{t=0}^n \left(\frac{CPI_n}{CPI_{n-1}} \times FA_n \right) - \sum_{t=0}^n FA_n$$

FA = *Fixed Asset* (aset tetap)

CPI = *Consumer Price Index*

n = tahun yang akan diuji (dalam hal ini adalah 2018)

i = tahun yang dijadikan patokan dimulai dari tahun pembelian aset. Dalam hal ini, pembelian aset diasumsikan tahun 2017.

Jika terdapat kelompok aset tetap tertentu menggunakan metode revaluasi sebagai dasar pengukuran setelah pengakuan awal, maka kelompok aset tetap tersebut dikurangkan dari nilai total aset tetap tahun berjalan, selisihnya (aset yang dinilai menggunakan dasar *historical cost*) perlu disesuaikan dengan memperhitungkan inflasi tahun berjalan.

Uji t untuk dua sampel berpasangan (*paired t-test*), dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar *error* dari perbedaan rata-rata dua sampel (Ghozali, 2006). Uji statistik ini digunakan untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, sampel terdiri dari 12 Bank Umum Syariah yang telah mempublikasikan laporan keuangan untuk tahun 2018, namun mendapat perlakuan yang berbeda karena akan dilakukan perbandingan penilaian aset pada perusahaan tersebut dengan menggunakan metode *current cost accounting* dan *historical cost accounting*. Metode penilaian yang berbeda akan menghasilkan laba yang berbeda sehingga akan berpengaruh terhadap ekuitas; selisihnya akan dialokasikan ke *current asset*. Hal tersebut akan berdampak terhadap besarnya aset (harta) kena zakat.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 ANALISIS STATISTIKA DESKRIPTIF

Analisis statistika deskriptif pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan besaran laba yang diperoleh 12 Bank Umum Syariah di Indonesia yang terpilih sebagai sampel, dengan menggunakan dasar pengukuran *historical cost* dan *current cost*. Selain itu, melalui analisis ini juga dapat diketahui bank yang menghasilkan laba tertinggi dan juga yang terendah selama periode tahun 2018.

Tabel 1. Perbandingan Laba Menggunakan Dasar Pengukuran Historical Cost dan Current Cost Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018

(dalam juta rupiah)

| No | Kode | HC | CC | Selisih |
|----|-------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | BSM | Rp 836.649 | Rp 901.316 | Rp 64.667 |
| 2 | BJBS | Rp 37.086 | Rp 39.130 | Rp 2.044 |
| 3 | BRIS | Rp 157.473 | Rp 150.111 | Rp (7.362) |
| 4 | BMS | Rp 62.270 | Rp 51.638 | Rp (10.632) |
| 5 | BSB | Rp 1.525 | Rp 1.506 | Rp (19) |
| 6 | BCAS | Rp 72.393 | Rp 76.446 | Rp 4.053 |
| 7 | BNIS | Rp 550.238 | Rp 562.571 | Rp 12.333 |
| 8 | BPS | Rp 21.412 | Rp 25.462 | Rp 4.049 |
| 9 | BVS | Rp 6.336 | Rp 6.422 | Rp 86 |
| 10 | BAS | Rp 540.281 | Rp 555.724 | Rp 15.443 |
| 11 | BTPNS | Rp 1.299.019 | Rp 1.347.873 | Rp 48.854 |
| 12 | BNTBS | Rp 53.360 | Rp 52.194 | Rp (1.166) |
| | | Rp 3.638.043 | Rp 3.770.392 | Rp 132.349 |

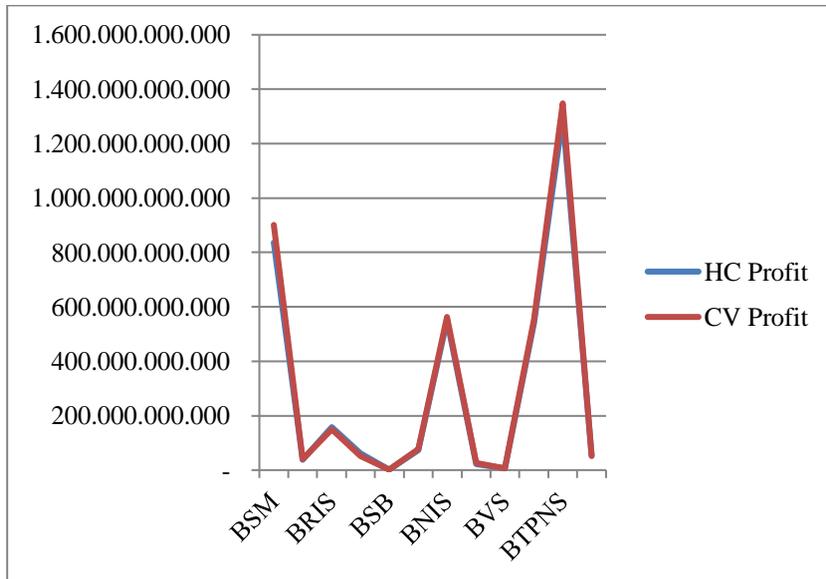
Sumber : Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan data pada Tabel 1 di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan nilai atau selisih (dalam rupiah) antara laba yang diperoleh dengan dasar pengukuran *historical cost* dengan laba yang telah mengalami penyesuaian dengan menggunakan dasar pengukuran *current cost*. Dari 12 sampel Bank Umum Syariah, terdapat 8 bank yang memiliki laba dengan dasar pengukuran *current cost* lebih tinggi dibandingkan dengan laba yang diukur dengan dasar pengukuran *historical cost*.

Berdasarkan pada tingkat laba yang dihasilkan, baik dengan menggunakan dasar pengukuran *historical cost* maupun *current cost*, terdapat tiga Bank Umum Syariah yang memiliki laba tertinggi, yaitu: (1) Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS); (2) Bank Syariah Mandiri (BSM); dan (3) Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS). Sedangkan bank

yang memiliki tingkat laba terendah selama tahun 2018 yaitu Bank Syariah Bukopin.

Grafik 1. Perbandingan Laba Menggunakan Dasar Pengukuran Historical Cost dan Current Cost Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018



Sumber : Data sekunder diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 1 dan Grafik 1 di atas dapat dinyatakan bahwa secara umum, total laba dari 12 bank yang dihitung dengan menggunakan dasar pengukuran *current cost* lebih tinggi dibandingkan dengan laba yang diperoleh dengan dasar pengukuran *historical cost* yang langsung diperoleh dari Laporan Laba Rugi Komprehensif bank syariah yang bersangkutan.

Perbedaan atau selisih besaran laba yang dihasilkan dengan dasar pengukuran *historical cost* maupun *current* akan berpengaruh terhadap nilai aset lancar dan ekuitas. Jika laba dengan dasar *current cost* lebih besar dari laba bersih dengan *historical cost*, maka aset lancar akan bertambah dan nilai aset/harta kena zakat juga meningkat. Karena aset lancar adalah bagian dari aset yang nantinya menjadi objek zakat, maka besaran zakat yang dibayarkan juga meningkat. Sebagai ilustrasi, total selisih laba dari 12 Bank Umum Syariah dengan menggunakan dasar pengukuran *historical cost* dan *current cost* adalah Rp 132.349.056.230. Dengan demikian, potensi zakat yang hilang akibat menggunakan dasar pengukuran *historical cost* adalah Rp 3.308.726.406 ($2,5\% \times \text{Rp } 132.349.056.230$).

4.2 PENGUJIAN HIPOTESIS (PAIRED T – TEST)

Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan *paired t-test* dengan rangkaian pengujian yang akan ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Uji Normalitas Data

| One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | | LNHC | LNCV |
| N | | 12 | 12 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | 25,1313 | 25,1469 |
| | Std. Deviation | 2,03991 | 2,04765 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,155 | ,156 |
| | Positive | ,108 | ,100 |
| | Negative | -,155 | -,156 |
| Test Statistic | | ,155 | ,156 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,200 ^{c,d} | ,200 ^{c,d} |

Sumber : Data diolah, 2020

Sebelum melakukan rangkaian pengujian sampel berpasangan *paired t-test*, perlu dilakukan terlebih dahulu uji normalitas distribusi data pada sampel. Berdasarkan hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan Uji *Kolmogorov Smirnov*, maka diperoleh data pada penelitian ini telah terdistribusi secara normal yang dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,200 >$ dari $0,05$ sehingga H_0 diterima yang artinya tidak ada perbedaan signifikan data – data yang telah menjadi sampel sehingga dapat disimpulkan data telah terdistribusi secara normal.

Tabel 3. Uji Rata – Rata

| Paired Samples Statistics | | | | | |
|---------------------------|------|---------|----|----------------|-----------------|
| | | Mean | N | Std. Deviation | Std. Error Mean |
| Pair 1 | LNHC | 25,1313 | 12 | 2,03991 | ,58887 |
| | LNCV | 25,1469 | 12 | 2,04765 | ,59111 |

Sumber : Data diolah, 2020

Tahap pertama pengujian sampel berpasangan *paired t-test* adalah menganalisis rata – rata laba *historical cost* dan laba *current cost*. Berdasarkan informasi pada Tabel 2 di atas rata – rata laba Bank Umum Syariah menurut *historical cost* yang sebelumnya telah ditransformasikan ke dalam logaritma natural (LN) adalah 25,1313 sedangkan rata – rata laba Bank Umum Syariah menurut *current cost* yang sebelumnya telah ditransformasikan ke dalam logaritma natural (LN) adalah 25,149. Berdasarkan hasil rata – rata tersebut, terlihat bahwa laba menurut *current cost* lebih tinggi dibandingkan dengan laba menurut *historical cost* meskipun perbedaannya tidak terlihat secara signifikan.

Tabel 4. Uji Korelasi

| Paired Samples Correlations | | | | |
|-----------------------------|-------------|----|-------------|------|
| | | N | Correlation | Sig. |
| Pair 1 | LNHC & LNCV | 12 | ,999 | ,000 |

Sumber : Data diolah, 2020

Tahap kedua yaitu uji korelasi. Berdasarkan pada pengujian *paired samples correlation* pada Tabel 4 diatas terlihat terdapat hubungan korelasi positif di antara variabel laba yang diukur dengan *historical cost* dan variabel laba yang diukur dengan *current cost*, yang dibuktikan dengan korelasi 0,999 dengan tingkat probabilitas signifikansi $0,000 < 0,05$.

Tabel 5. Uji Hipotesis Paired Sampel T-Test

| Pair | LNHC - LNC V | Paired Differences | | | | | t | df | Sig. (2- tailed) |
|------|-----------------------|--------------------|----------------|------------|---|-------|-------|----|----------------------------|
| | | Mean | Std. Deviation | Std. Error | 95% Confidence Interval of the Difference | | | | |
| | | | | | Lower | Upper | | | |
| 1 | | -,016 | ,085 | ,025 | -,069 | ,038 | -,634 | 11 | ,539 |

Sumber : Data sekunder yang diolah tahun 2020

Tahap terakhir yaitu pengujian hipotesis dengan menggunakan *paired sampel t-test*. Berdasarkan output olah data pada Tabel 5 di atas diperoleh nilai probabilitas signifikansi $0,539 > 0,05$ yang berarti bahwa Hipotesis nol (H_0) diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara statistik dengan $\alpha = 5\%$ laba Bank Umum Syariah Tahun 2018 yang dihasilkan dengan menggunakan dasar pengukuran *historical cost* tidak berbeda secara signifikan dengan laba yang dihasilkan dengan menggunakan dasar pengukuran *current cost*.

4.3 PEMBAHASAN

Hasil pengujian hipotesis menggunakan *paired sample t-test* menunjukkan bahwa Hipotesis nol (H_0) diterima, yang berarti bahwa secara statistik dengan dengan $\alpha = 5\%$ tidak terdapat perbedaan signifikan antara laba yang dihasilkan dengan dasar pengukuran *historical cost* dan laba yang dihasilkan dengan dasar pengukuran *current cost*. *Current cost* merupakan dasar pengukuran unsur laporan keuangan dimana biaya dari suatu aset atau liabilitas disesuaikan dengan harga saat ini yang berlaku terhadap aset yang memiliki kondisi yang sama. Harga suatu aset sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik aset tersendiri dan tingkat permintaan dan penawaran atas aset tersebut yang nantinya akan mempengaruhi tingkat inflasi.

Perbedaan yang tidak signifikan secara statistik ini disebabkan oleh tingkat inflasi yang tidak berbeda secara signifikan setiap tahunnya sehingga menyebabkan kenaikan harga tidak terlalu signifikan berubah, bahkan terjadi

penurunan inflasi pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2017, tingkat inflasi per tahun Indonesia yang diprosikan melalui Indeks Harga Konsumen (IHK) yaitu 3,61 % dan tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 3,13 %. Inflasi merupakan dasar penyesuaian aset dalam pengukuran *current cost*. Dalam kondisi yang sesungguhnya, *current cost* dari aset pada periode pelaporan tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat inflasi, tetapi berbagai faktor lainnya seperti tingkat risiko bawaan aset, kondisi lingkungan dan tingkat kompetisi pelaku pasar yang tidak dapat diperhitungkan dalam penyesuaian laba.

5. KESIMPULAN

Dasar pengukuran *historical cost* menghasilkan besaran nominal laba yang berbeda (dalam rupiah) dengan dasar pengukuran *current cost*. Secara umum, rata-rata laba bank Umum Syariah tahun 2018 yang dihitung dengan menggunakan dasar pengukuran *current cost* lebih tinggi dibandingkan dengan laba yang diperoleh dengan dasar pengukuran *historical cost*. Jika laba dengan dasar *current cost* lebih besar dari laba bersih dengan *historical cost*, maka aset lancar akan bertambah dan nilai aset/harta kena zakat juga meningkat. Hasil uji statistik *paired t-test* menunjukkan bahwa secara statistik dengan $\alpha = 5\%$ laba 12 Bank Umum Syariah Tahun 2018 yang dihasilkan dengan menggunakan dasar pengukuran *historical cost* tidak berbeda secara signifikan dengan laba yang dihasilkan dengan menggunakan dasar pengukuran *current cost* (prob. 0,539 > 0,05). Dengan demikian, H_a ditolak.

Mengingat model pengukuran *current cost* dan *historical cost* dapat menghasilkan besaran laba dan besaran zakat yang berbeda serta dasar pengukuran *current cost* berdasarkan pendapat ahli fikih selaras dengan prinsip syariah, maka Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) dapat mempertimbangkan untuk mengatur secara khusus dasar pengukuran yang sebaiknya digunakan untuk menghitung dan melaporkan kewajiban zakat perusahaan. Bank syariah sebagai entitas syariah yang berkewajiban membayar zakat atas bisnisnya maupun lembaga penghimpun zakat seperti Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat juga seharusnya memiliki pemahaman yang memadai tentang dasar pengenaan zakat ketika menghitung zakat perusahaan.

Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menggunakan sampel entitas syariah yang tidak hanya berasal dari sektor perbankan, tetapi dari berbagai sektor industri sehingga dapat diperbandingkan antara satu sektor industri dengan industri yang lain. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan alternatif metode lainnya yang diperkenankan sebagai dasar perhitungan zakat perusahaan sehingga dapat memperkaya literatur tentang zakat perusahaan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, E. R., Bin Aiffin, K. H., Yousif Alabdullah, T. T., & Zuqebah, A. (2016). Zakat and accounting valuation model. *Journal of Reviews on Global Economics*. <https://doi.org/10.6000/1929-7092.2016.05.02>
- Awang, R., & Mokhtar, M. Z. (2012). Comparative Analysis of Current Values and Historical cost in Business Zakat Assessment: An Evidence from Malaysia. *International Journal of Business and Social Science*.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Ikatan Akuntan Indonesia* (Cetakan Pe). Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Farhan, A., & Triyuwono, I. (2012). Metode Perhitungan Zakat Perusahaan pada CV. Minakjinggo. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2).
- Gambling, T., & Karim, R. A. A. (1991). *Bussinees and Accounting Ethics in Islam*. London: Mansell Publisher.
- Ghozali, I. (2006). Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit UNDIP. In *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*.
- Harahap, S. S. (2011). *Teori Akuntansi Edisi Revisi 2011*. Rajawali Pers. <https://doi.org/www.rajagrafindo.com>
- Hartono, A. (2016). DEVIASI ATAS RELEVANSI KONSEP LAPORAN KEUANGAN HISTORICAL COST DAN CURRENT COST DENGAN KONSEP AKUNTANSI SYARIAH TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN. *Ekulilibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*. <https://doi.org/10.24269/ekulilibrium.v10i1.43>
- Mirza, M., & Baydoun, N. (2000). Accounting policy choice in an interest-free environment. *Accounting, Commerce and Finance: The Islamic Perspective Journal*.
- Mufraini, M. A. (2006). *Akuntansi dan manajemen zakat*. Prenadamedia Group.
- Muhammad. (2003). Penilaian Asset Dalam Akuntansi Syari'ah. *Penilaian Aset Dalam Akuntansi Syariah*.
- Muhammad, P. A. S. (2005). edisi 2. *Jakarta: Salem-Ba Empat*.
- Pratiwi, M., & Siswantoro, D. (2018). Fair Value in the Islamic Perspective: Jakarta Islamic Index (JII) Companiesr Cases. <https://doi.org/10.2991/iac-17.2018.47>
- Qardhawi, Y. (2004). Hukum Zakat (terjemahan dari buku Fiqhuz Zakat). *Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa*.
- Sidik, G. K., & Djazuli, A. (2010). Relevansi Current Value Accounting Sebagai Metode dalam Menilai Harta Zakat Perusahaan. *Jurnal*

Akuntansi Islam, 01 No. 1(Juni 2010), 139–164.

Suwardjono. (2011). *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan edisi ketiga cetakan kelima. Teori Akuntansi Perekayasaan Laporan Keuangan (edisi ketiga)*.

Syafei, A. W. (2008). *Mari Dukung PSAK Zakat Perusahaan. Republika*.

Triyuwono, I. (2012). *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori Edisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wasilah, S. N. D. (2013). *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat*.

YAYA, R. (2003). OBJECTIVES AND CHARACTERISTICS OF ISLAMIC ACCOUNTING : Perceptions of Muslim Accounting Academicians IN YOGYAKARTA , INDONESIA Rizal Yaya. *In International Conference Pan Pacific*.

APAKAH KEPERCAYAAN MUWAKIF DITENTUKAN OLEH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DAN PERAN NADZIR ?

Agus Sulaeman, Ai Nur Bayinah, Roni Hidayat

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI

Email: agus.27s.akun@gmail.com, ai.nur.bayinah@sebi.ac.id, ronihidayat.ma@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of accountability in cash waqf management and role of nadzir towards level of muwakif trust in Indonesia. This research type is quantitative research using a survey method with the correlation approach. The data used are primary data by spreading the questionnaires to 100 muwakif in Indonesia. samples were taken by using random sampling techniques. Analysis data used to test the hypotheses using multiple linear regression analysis. The results of this study stated that the variable of accountability in cash waqf management and role of nadzir have a positive effect and significant on the level of muwakif trust in Indonesia, Therefore to increase the muwakif trust, nadzir institutions must increase information dissemination, honesty, punctuality, according to ethical standards and laws, clear targets, and easy access to information. Also, the role of nadzir in carrying out their duties must be increased, like the responsibility for collecting and managing cash waqf, the efficiency of the program and the budget, the rationalization between the draft budget and the program to be implemented.

Keywords: Accountability; Cash Waqf Management, Role of Nadzir, Muwakif Trust

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf tunai dan peran nadzir terhadap tingkat kepercayaan muwakif di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei dengan pendekatan korelasional. Data yang digunakan adalah data primer dengan menyebarkan kuisioner ke 100 muwakif di Indonesia. Sampel diambil dengan menggunakan teknik random sampling. Analisis data digunakan untuk menguji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf tunai dan peran nadzir berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan muwakif di Indonesia, oleh karena itu untuk meningkatkan kepercayaan muwakif, lembaga nadzir harus meningkatkan penyebaran informasi, kejujuran, ketepatan waktu, sesuai dengan standar dan hukum etika, target yang jelas, dan akses mudah ke informasi. Juga, peran nadzir dalam melaksanakan tugas mereka harus ditingkatkan, seperti tanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengelola wakaf tunai, efisiensi program dan anggaran, rasionalisasi antara rancangan anggaran dan program yang akan dilaksanakan

Kata kunci: Akuntabilitas; Manajemen Wakaf Tunai, Peran Nadzir, Kepercayaan Muwakif

1. PENDAHULUAN

Dalam perekonomian yang diatur oleh Islam, terdapat beberapa kegiatan yang memiliki tujuan untuk kepentingan sosial antara lain zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Zakat, infaq, dan shadaqah merupakan kegiatan yang paling sering dilakukan, dimana dalam pengelolaannya pun tidak terlalu sulit, sehingga banyak lembaga sosial yang mengelola kegiatan tersebut. Sedangkan di luar itu yakni wakaf sedikit berbeda dalam pengelolaan dan penghimpunannya, pada umumnya wakaf dikenal sebagai merelakan tanah yang dimiliki untuk tujuan umum seperti pembangunan masjid dan sekolah. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat pada umumnya terutama masyarakat yang memiliki penghasilan dibawah rata-rata belum tertarik dengan wakaf, dikarenakan mereka berpikir bahwa untuk melakukan wakaf perlu biaya yang sangat tinggi dibandingkan zakat, infaq, dan shadaqah.

Pada dasarnya, fenomena admistrasi wakaf yang tidak efisien di negara-negara muslim dapat dikaitkan dengan kolonialisme dari tanah muslim (Yaacob, 2013), situasi politik dan kurangnya akuntabilitas mutawalli. Ada bermacam-macam variasi yang berkaitan dengan pengembangan wakaf di berbagai daerah disebabkan kondisi politik, ekonomi dan budaya lokal. Namun, dalam dekade terakhir kesadaran revitalisasi lembaga wakaf baru muncul di antara negara-negara Muslim. Misalnya, pemerintah Sri Lanka, Sudan, dan Indonesia yang menyadari kebutuhan akan perkembangan wakaf dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik, dalam artian menjadikan masyarakat menjadi lebih sejahtera. diantara negara-negara muslim, pemerintah Indonesia telah membuat reformasi besar dalam revitalisasi lembaga wakaf melalui penerapan tindakan wakaf untuk mengatur lembaga wakaf di Indonesia, hal ini tertuang dalam UU No.41 tahun 2004 mengenai wakaf (Pitchay & Abd Jalil, 2016).

Berkembangnya lembaga wakaf di Indonesia pun menunjukkan antusiasme masyarakat mengenai wakaf. Tidak sedikit masyarakat yang telah sadar dalam mengelola uang mereka untuk kegiatan amal dengan menginvestasikan uang mereka dalam kegiatan perwakafan di Indonesia pada lembaga-lembaga wakaf di Indonesia. Kepercayaan yang besar dari para masyarakat kepada lembaga wakaf, menjadikan lembaga wakaf menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini. Sebagai seorang pewakaf, sudah menjadi hak seorang pewakaf untuk mengetahui bagaimana penggunaan harta mereka yang telah diwakafkan oleh lembaga tersebut (Ihsan, Septriani, & Eliyanora, 2016).

Penelitian sebelumnya mengenai akuntabilitas lembaga pengelola wakaf Telah dilakukan oleh Budiman yang melakukan penelitian Tentang akuntansi lembaga pengelola wakaf . Hasil penelitian budiman menyatakan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf (Budiman, 2011). Akuntabilitas merupakan proses dimana suatu lembaga menganggap dirinya bertanggung jawab secara terbuka mengenai apa yang dilakukan dan tidak dilakukannya.

Secara operasional akuntabilitas diwujudkan dalam bentuk pelaporan (reporting), pelibatan (involving), dan cepat tanggap (responding). Akuntabilitas dapat menumbuhkan kepercayaan (trust) masyarakat kepada lembaga. Karena itu akuntabilitas menjadi sesuatu yang penting karena akan mempengaruhi legitimasi terhadap lembaga pengelola wakaf. Dengan demikian, akuntabilitas bukan semata-mata berhubungan dengan pelaporan keuangan dan program yang dibuat, melainkan berkaitan pula dengan persoalan legitimasi publik (Budiman, 2011).

Salah satu kunci keberhasilan wakaf adalah terletak pada eksistensi pengelola, oleh karena itu nadzir memiliki peranan yang sangat penting bagi pengelolaan wakaf (Kasdi, 2014). Dengan demikian, nadzir seharusnya di dukung dan didorong semaksimal mungkin untuk mencapai level kinerja Dan performa yang maksimal, sehingga lebih signifikan dalam memainkan peran sosial untuk meningkatkan peran wakaf. Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nadzir secara baik dan profesional akan membuat Masyarakat akan semakin percaya sehingga jumlah muwakif akan terus semakin bertambah banyak.

Masalah yang lagi dihadapi para nadzir sekarang ini adalah faktor Trust dari masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf tunai, dan aspek sistem yang minim kreativitas dalam mengelola dan mengembangkan dana wakaf yang menganggur. Sehingga pengelolaan lembaga pengelola wakaf (nadzir) terlihat seperti hidup segan mati tak mau. Hasilnya adalah harta wakaf nya dikelola asal jalan dan masih kurang produktif (Dahlan, 2018).

Faktor yang mempengaruhi kepercayaan dari masyarakat, yaitu: pertama, masalah sosialisasi, salah satu mazhab yang populer di Indonesia adalah Mazhab Syafi'I, di mana ini tidak menerangkan tentang wakaf uang. Hal ini merupakan tantangan karena masyarakat akan mengalami konflik dengan adanya pemahaman yang dianggap baru di kalangannya. Tak hanya terjadi pada masyarakat saja, masalah sosialisasi juga terhambat pada media, baik media cetak dan elektronik. Sosialisasi dan edukasi mengenai wakaf belum terlihat masif. Hal inilah yang menyebabkan masalah wakaf uang tidak familiar di kalangan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Kedua, masalah kelembagaan yang masih belum terlalu kuat payung hukumnya. Ketiga, kurangnya kepekaan pemerintah untuk memanfaatkan potensi wakaf uang sehingga akses masyarakat untuk menyalurkan wakafnya masih belum dijangkau secara optimal serta transparan dalam pengelolaan dan alokasi dana wakaf masih kurang sehingga hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan wakaf (Fitri & Wilantoro, 2018).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan wakaf tunai dan peran nadzir baik secara simultan maupun parsial terhadap tingkat kepercayaan muwakif di Indonesia.

2. TELAAH TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. WAKAF TUNAI

Wakaf tunai merupakan wakaf yang dilakukan individu, kelompok, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek, dan lainnya yang disalurkan dan digunakan hanya untuk hal-hal di perbolehkan oleh syariat Islam. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para ahli fikih. Beberapa sumber menyatakan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi (Santoso, 2017).

2.2. PENGERTIAN DAN URGENSI AKUNTABILITAS

Literatur-literatur yang ada menunjukkan ada dua ide dasar yang membangun konsep akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas sangat berkaitan erat dengan tanggung jawab atau tanggung jawab. Banyak peneliti yang kemudian setuju bahwa akuntabilitas lahir karena adanya keinginan untuk menerima dan menunjukkan tanggung jawab. Konsep yang kedua adalah akuntabilitas akan melibatkan setidaknya dua pihak, pihak yang memberikan tanggung jawab dan satunya lagi pihak yang menerima tanggung jawab itu dengan kemampuan untuk melaporkan, memperhitungkan atau memberikan penjelasan atasnya (Ihsan et al., 2016). Akuntabilitas adalah kemampuan untuk menunjukkan tanggung jawab oleh pihak yang menerimanya dengan kewajiban untuk melaporkan, memperhitungkan dan memberikan penjelasan atas tanggung jawab yang diserahkan padanya.

Akuntabilitas telah menjadi fenomena yang luas yang bisa ditemui dalam hampir setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari kehidupan pribadi, sosial, dunia kerja dan juga dalam ajaran agama. Tanpa akuntabilitas, maka seseorang atau lembaga akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Dari perspektif agama dapat di garis bawahi bahwa konsep akuntabilitas adalah tema sentral dalam ajaran Islam, karena akuntabilitas kepada Allah dan juga komunitas muslim merupakan bentuk nyata keimanan seseorang (Ihsan & Ibrahim, 2011). Dalam hal ini bentuk akuntansi dalam islam ada dua yaitu Manusia bertanggung jawab kepada Allah dan melakukan pertanggung jawaban kepada sesama manusia atas apapun kontrak yang telah mereka buat. Ilmu Akuntansi dan pelaporan merupakan sebuah dasar yang dianggap sebagai salah satu perangkat yang paling penting bagi akuntabilitas (Yaacob, Petra, Sumardi, & Nahar, 2015).

2.3. NADZIR

Nadzir merupakan lembaga atau individu yang memiliki peranan paling vital atas pengelolaan dan penghimpunan dana wakaf, sekaligus yang paling bertanggung jawab atas harta wakaf yang dipercayakan padanya, baik menyangkut pemeliharaan harta wakaf, maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Semua aktivitas nadzir atas harta wakaf yang dihimpun harus selalu mempertimbangkannya agar harta wakaf tersebut berkesinambungan dalam mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan

mauqif 'alaih. Oleh karena itu, peran nadzir bukan berfokus pada masalah menghimpun dana lalu langsung membelanjakannya, akan tetapi bisa menjadikan harta tersebut menjadi aset terlebih dahulu, kemudian mengelola aset tersebut menjadi produktif dan bisa menghasilkan keuntungan agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain seperti sedekah. Kemampuan nadzir seperti ini sangat diperlukan agar wakaf bisa lebih maksimal dalam pemanfaatannya, tentu ini menjadi tuntutan nadzir bukan hanya sebatas wawasan tentang wakaf, tetapi memerlukan keahlian agar para nadzir mampu mengelola aset dengan prinsip syariah dalam berinvestasi (Tiswarni, 2014).

Menjadikan aset wakaf menjadi produktif adalah merupakan salah satu tugas dan fungsi nadzir sebagai pengelola. Karena mengelola aset wakaf secara lebih efektif dan efisien adalah merupakan keharusan nadzir dalam menjalankan aktivitasnya (Bayinah, 2012). Dengan dilakukannya pengelolaan wakaf secara profesional oleh nadzir akan memberikan kesempatan pada lembaga wakaf menerapkan prinsip modern dalam pengelolaan wakaf, sehingga membuat performa nadzir lebih baik lagi dalam melakukan kerjanya (Kasdi, 2014).

2.4. TINGKAT KEPERCAYAAN

Kepercayaan pada hakekatnya adalah suatu keadaan psikologis seseorang dalam melakukan aktivitas, dalam hal ini kepercayaan yang dimaksud ketika melakukan wakaf tunai di lembaga nadzir. Dalam wakaf tunai salah satu hal yang memberikan dukungan dalam penghimpunan dan pengembangannya yaitu kepercayaan. Selain itu, kepercayaan juga memberikan indikasi bahwa seseorang ada keinginan untuk bertumpu kepada pihak lain dimana seseorang memiliki keyakinan terhadap pihak tersebut (Sugara & Dewantara, 2017). Kepercayaan juga merupakan keadaan mental yang didasari oleh keadaan seseorang dan konteks sosialnya, dalam penelitian ini kepercayaan yang diberikan muwakif kepada nadzir.

Dalam definisi lain, kepercayaan di artikan sebagai wujud keyakinan satu pihak terhadap janji pihak lain yang bersifat realible, Dan merupakan alasan dasar untuk memiliki ikatan dengan pihak lain (Elrado H, Kumadji, & Yulianto, 2014). Beberapa faktor yang menjadi dasar agar terciptanya hubungan yang baik berdasarkan kepercayaan, yaitu :

1. Penilaian terhadap kompetensi atau keandalan perusahaan (perceived competence)
2. Penilaian terhadap keadilan dan kejujuran (perceived fairness)
3. Kepercayaan merupakan bentuk kesediaan satu pihak untuk bergantung pada pihak lainnya (Jasfar, 2012).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan pendekatan korelasi., teknik pengambilan sampel pada umumnya

dilakukan secara random (simple random sampling), kemudian dalam pengumpulan data menggunakan instrument penelitian serta analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dan bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan (Sugiyono, 2009).

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh mustahik yang berwakaf dilembaga nadzir yang ada di Indonesia dan tersertifikasi di BWI. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling yaitu pengambilan sampel dengan memberi kesempatan yang sama pada setiap elemen tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2009).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS for Windows 25.00. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

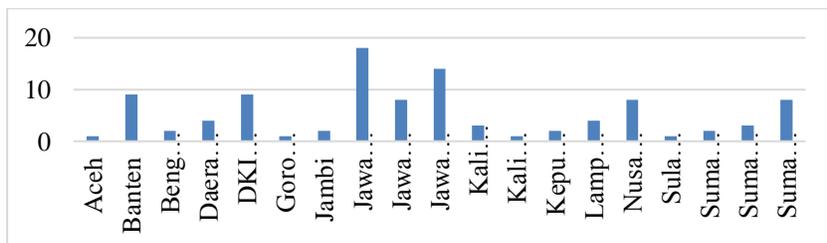
4.1. DESKRIPSI RESPONDEN

Berdasarkan data yang diolah berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini melalui kuisisioner secara random, dan berdasarkan rumus slovin maka responden yang digunakan adalah sebanyak 100 responden. Karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini adalah asal daerah, dan lembaga nadzir yang dipilih oleh muwakif serta nominal yang diwakafkan. Berikut ini merupakan hasil pengelompokan responden berdasarkan kuisisioner yang telah dibagikan :

4.1.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Asal daerah

Pengelompokan responden berdasarkan Asal daerah adalah sebagai berikut:

Grafik 1. Asal Daerah



Sumber: Data diolah, 2019

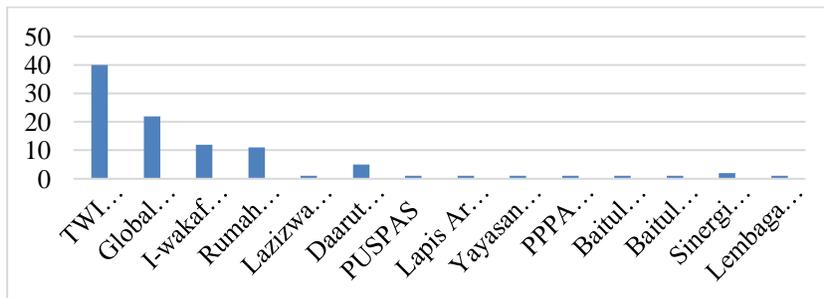
Berdasarkan grafik 1 di atas, dapat diketahui bahwa asal daerah responden sebagian besar adalah di provinsi Jawa Barat sebanyak 18 orang atau 18%, Aceh sebanyak 1 orang atau 1%, Banten 9 orang atau 9%, Bengkulu 2 orang atau 2%, Daerah Istimewa Yogyakarta 4 orang atau 4%,

Dki Jakarta 9 orang atau 9%, Gorontalo 1 orang atau 1%, jambi 2 orang atau 2%, Jawa tengah 8 orang atau 8%, Jawa Timur, 14 orang atau 14%, Kalimantan Barat 3 orang atau 3%, Kalimantan Selatan 1 orang atau 1%, Kepulauan Riau 2 orang atau 2%, Lampung 4 orang atau 4%, Nusa Tenggara Barat 8 orang atau 8%, Sulawesi Tenggara 1 orang atau 1%, Sumatera Barat 2 orang atau 2%, Sumatera Selatan 3 orang atau 3%, dan Sumatera Utara 8 orang atau 8%. Dapat dikatakan bahwa, responden yang berasal dari daerah Jawa barat lebih tertarik untuk melakukan wakaf tunai.

4.1.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Lembaga Nadzir yang Dipilih

Pembagian responden berdasarkan lembaga nadzir yang dipilih :

Grafik 2. Lembaga Nadzir



Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan grafik 2 di atas, dapat diketahui bahwa lembaga nadzir yang paling banyak dipilih oleh responden adalah TWI (Dompot Dhuafa) sebanyak 40 orang atau 40%, sedangkan Global wakaf (ACT) 22 orang atau 22%, I-wakaf (PKPU) sebanyak 12 orang atau 12%, Rumah Wakaf indonesia sebanyak 11 orang atau 11%, Lazizwa Masa sebanyak 1 orang atau 1%, Daarut Tauhid sebanyak 5 orang atau 5%, PUSPAS sebanyak 1 orang atau 1%, Lapis Ar-Risalah sebanyak 1 orang atau 1%, Yayasan Nurul hayat sebanyak 1 orang atau 1%, PPPA DARUL QUR'AN sebanyak 1 orang atau 1 %, Baitul Maal Munzalan indonesia sebanyak 1 orang atau 1%, Baitul Maal Hidayatullah sebanyak 1 orang atau 1%, Sinergi Foundation sebanyak 2 orang atau 2%, dan terakhir Lembaga Wakaf dan pertanahan NU sebanyak 1 orang atau 1%.

4.2. UJI INSTRUMEN PENELITIAN

4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji valid atau tidaknya suatu kuisioner. Kriteria yang digunakan yaitu jika r hitung lebih besar dari r tabel (r hitung $>$ r tabel), maka data dikatakan valid. Tingkat signifikannya yaitu 5% atau 0,05. Rumus perhitungan *Degree of freedom* yaitu, dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah konstruksi. Dalam penelitian ini jumlah sampel yaitu 100, yaitu dengan menggunakan alpha 0,05 atau 5%, maka didapat r tabel sebesar 0,195. Adapun untuk hasil uji validitas adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Uji Validitas

| Variabel | Pertanyaan | r Hitung | r Tabel | Keterangan |
|--|------------|----------|---------|------------|
| Akuntabilitas pengelolaan wakaf tunai (X1) | X1.1 | 0,550 | 0,195 | Valid |
| | X1.2 | 0,604 | 0,195 | Valid |
| | X1.3 | 0,481 | 0,195 | Valid |
| | X1.4 | 0,404 | 0,195 | Valid |
| | X1.5 | 0,577 | 0,195 | Valid |
| | X1.6 | 0,286 | 0,195 | Valid |
| Peran nadzir (X2) | X2.1 | 0,574 | 0,195 | Valid |
| | X2.2 | 0,463 | 0,195 | Valid |
| | X2.3 | 0,559 | 0,195 | Valid |
| | X2.4 | 0,351 | 0,195 | Valid |
| | X2.5 | 0,573 | 0,195 | Valid |
| Tingkat kepercayaan muwakif (Y) | Y1 | 0,536 | 0,195 | Valid |
| | Y2 | 0,538 | 0,195 | Valid |
| | Y3 | 0,648 | 0,195 | Valid |
| | Y4 | 0,643 | 0,195 | Valid |
| | Y5 | 0,524 | 0,195 | Valid |

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan tabel 1 diatas, maka dapat diketahui bahwa r tabel diperoleh sebesar 0,195. Sehingga dapat disimpulkan bahwa t hitung dari variabel Akuntabilitas pengelolaan wakaf tunai (X1), Peran *nadzir* (X2) dan Tingkat kepercayaan *muwakif* (Y) lebih besar dari t tabel, maka dikatakan valid. Artinya semua item pertanyaan mampu mengukur variabel akuntabilitas pengelolaan wakaf tunai, peran *nadzir*, dan tingkat kepercayaan *muwakif*.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel. Pada dasarnya, suatu kuisioner dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,50 (Delsie et al., 2018).

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan wakaf tunai (X1) sebesar 0,560 > 0,50, peran *nadzir* (X2) sebesar 0,595 > 0,50, dan tingkat kepercayaan *muwakif* sebesar 0,764 > 0,50. Sehingga nilai *Cronbach's Alpha* tidak ada yang dibawah nilai kritis > 0,50. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan wakaf tunai, peran *nadzir* dan tingkat kepercayaan *muwakif* yang digunakan dalam penelitian ini reliabel dan lolos untuk uji Reliabilitas.

Tabel 2. Uji Reliabilitas

| Reliability Statistics | | Reliability Statistics | | Reliability Statistics | |
|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha | N of items | Cronbach's Alpha | N of items | Cronbach's Alpha | N of items |
| ,560 | 6 | ,595 | 5 | ,764 | 5 |

| Variabel | Cronbach's Alpha | Nilai Kritis | Keterangan |
|--|------------------|--------------|------------|
| Akuntabilitas pengelolaan wakaf tunai (X1) | 0,560 | 0,50 | Reliabel |
| Peran nadzir (X2) | 0,595 | 0,50 | Reliabel |
| Tingkat kepercayaan muwakif (Y) | 0,764 | 0,50 | Reliabel |

Sumber: Data diolah, 2019

4.3. UJI KETEPATAN MODEL

4.3.1 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Jika, nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. hasil Uji F dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Uji F

| Model | Sum of Squares | Df | Mean Square | F | Sig. |
|--------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 Regression | 212,846 | 2 | 106,423 | 20,062 | ,000 ^b |
| Residual | 514,544 | 97 | 5,305 | | |
| Total | 727,390 | 99 | | | |

a. Dependent Variable: TKM

b. Predictors: (Constant), PN, APWT

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 3 Hasil uji F dapat dilihat dari nilai F hitung , yaitu diperoleh hasil 20,062 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. Untuk mengetahui F table terlebih dahulu ditentukan derajat keabsahan (df1 dan df2). Dengan menggunakan signifikansi $\alpha = 5\%$, dimana df1 merupakan jumlah variable independen, df2 (nilai dari model residual /n-k-1) atau sama dengan 100 dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variable independen. Dalam F table diperoleh hasil 2,466 sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai Fhitung > Ftabel (20,262 > 2,466) dengan tingkat signifikansi 0.000 < 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan wakaf tunai dan peran *nadzir* secara simultan (bersama-sama) mempengaruhi Tingkat kepercayaan *muwakif*.

4.3.2 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui presentase variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel dependen. Hasil pengujian koefisien determinasi terlihat pada table dibawah ini:

Tabel 4. Koefisien Determinasi

| Model Summary | | | | |
|---------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | ,541 ^a | ,293 | ,278 | 2,303 |

a. Predictors: (Constant), PN, APWT

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4 Model *Summary* mempunyai nilai *R Square* sebesar 0,278, sehingga dapat dikatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan wakaf tunai dan peran *nadzir* berpengaruh sebesar 27,8% atau 0,278 terhadap Tingkat kepercayaan *muwakif*. Sedangkan 0,722 atau 72,2% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang tidak diteliti.

Nilai *R Square* yang kecil dikarenakan adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi variabel Tingkat kepercayaan *muwakif*. Karena pada dasarnya faktor-faktor lain seperti lokasi, sosialisasi, dan peran pemerintah juga turut mempengaruhi tingkat Tingkat kepercayaan *muwakif* yang melakukan wakaf di lembaga *nadzir* di Indonesia.

4.3.3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan wakaf tunai dan peran *nadzir* terhadap tingkat kepercayaan *muwakif* yang melakukan wakaf tunai di lembaga *nadzir* yang ada di Indonesia. Berdasarkan uji regresi linier berganda dapat diperoleh nilai regresi yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5 Uji Regresi Linier Berganda

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 7,166 | 1,925 | | 3,722 | ,000 |
| | APWT | ,347 | ,090 | ,375 | 3,871 | ,000 |
| | PN | ,270 | ,104 | ,252 | 2,604 | ,011 |

a. Dependent Variable: TKM

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel 5 di atas, maka dapat diperoleh hasil perhitungan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 7,166 + 0,347 X_1 + 0,270 X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi yang telah disusun dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai koefisien akuntabilitas pengelolaan wakaf tunai adalah sebesar 0,347. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan variabel Akuntabilitas wakaf tunai 1 satuan maka akan menaikkan variabel tingkat kepercayaan *muwakif* (Y) sebesar 0,347 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
2. Nilai koefisien peran *nadzir* adalah sebesar 0,270. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan variabel peran *nadzir* 1 satuan maka akan menaikkan variabel tingkat kepercayaan *muwakif* (Y) sebesar 0,270 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

Uji T menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:

H_0 = Tidak terdapat pengaruh positif dari variabel bebas terhadap variabel terikat

H_a = Terdapat pengaruh positif dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Berdasarkan tabel 5 tersebut, pembuktian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas pengelolaan wakaf tunai terhadap Tingkat kepercayaan *muwakif*.

Hasil Uji hipotesis variabel akuntabilitas pengelolaan wakaf tunai (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 3,871 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, jika dibandingkan dengan t tabel (1,661) maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $\alpha < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_{01} ditolak dan H_{11} diterima.

Hasil Uji hipotesis variabel akuntabilitas pengelolaan wakaf tunai (X1) memiliki nilai t hitung sebesar 3,871 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, jika dibandingkan dengan t tabel (1,661) maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan $\alpha < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_{11} diterima dan H_{01} ditolak, artinya Akuntabilitas pengelolaan wakaf tunai berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan *muwakif*(Y).

Hasil ini menunjukkan pelaksanaan akuntabilitas pada pengelolaan wakaf tunai di lembaga *nadzir* mampu meningkatkan kepercayaan *muwakif*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Alzaina, 2019) yang menyatakan bahwa bahwa pemulihan tingkat kepercayaan bisa dilakukan dengan menerapkan standar tata kelola yang baik dan benar seperti penerapan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban atas aktivitas organisasi dalam bentuk laporan oleh penerima amanah kepada pemberi amanah untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam segi akuntansi, akuntabilitas adalah aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar (Hamidi, 2013). Allah SWT berfirman dalam Al-Quran :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ... ٢٨٢

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...” (Q.S Al-Baqarah [2] : 282).

Dalam ayat ini Allah SWT menegaskan bahwasanya pencatatan dalam hal muamalah itu sangat penting, yang dimaksudkan dalam pencatatan adalah *muwakif* memberikan kepercayaan dan wewenang kepada lembaga *nadzir* dalam menghimpun dan mengelola sejumlah wakaf tunai. Oleh karena itu, tujuan dari pencatatan adalah untuk tujuan keterbukaan, kebenaran, kepastian dan keadilan antara *muwakif* yang memberikan sejumlah uang dan *nadzir* yang mengelola wakaf uang tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel yang berpengaruh positif dan signifikan dikarenakan akuntabilitas merupakan hal mendasar yang diperlukan untuk mencapai kinerja baik yang berkesinambungan. Organisasi atau lembaga yang baik harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ lembaga dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi lembaga agar terpenuhinya prinsip akuntabilitas. Selain itu, penerapan akuntabilitas agar lembaga dikelola dengan sebaik mungkin maka lembaga harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan lembaganya.

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan wakaf tunai berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan *muwakif* juga mendukung teori *stewardship* yang diangkat dalam penelitian (Raharjo, 2007) yang menyatakan tingkat kepercayaan tertanam dalam hubungan kontraktual dapat diasumsikan untuk dibudidayakan. Di dalam *stewardship theory* mengidentifikasi tiga bentuk, dalam hubungan akuntabilitas (pertanggungjawaban) yaitu keberadaan *Accountant*, *Accountee*, dan *Accountor*. Ketiga partisan tersebut saling berinteraksi dalam suatu jaringan. *Accountant* adalah pihak yang mengukur kinerja ekonomi, *Accountee* (*steward*) yaitu pihak yang bertanggungjawab, dan *Accountor* (*principal*) pertanggungjawaban diberikan atas apa yang telah dikerjakan dalam organisasi tersebut.

Pernyataan yang menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan wakaf tunai berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan *muwakif* juga mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ihsan et al., 2016) yang menyatakan sebagai institusi yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak, masalah akuntabilitas adalah suatu keniscayaan dalam pengelolaan wakaf. Oleh karena itu penerapan akuntabilitas haruslah menjadi perhatian bagi semua lembaga *nadzir* agar mampu meningkatkan kepercayaan *muwakif*.

Dalam variabel akuntabilitas pengelolaan wakaf tunai yang terdiri dari 6 indikator berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan *muwakif*, hal ini sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh (Hasrina et al., 2018) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan. Oleh karena itu, akuntabilitas pada lembaga-lembaga sosial khususnya lembaga *nadzir* harus selalu ditingkatkan supaya tingkat kepercayaan *muwakif* dan masyarakat umum lainnya semakin meningkat.

2. Peran nadzir terhadap Tingkat kepercayaan muwakif.

Hasil Uji hipotesis variabel peran *nadzir* (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 2,604 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,011, jika dibandingkan dengan t tabel (1,661) maka t hitung > t tabel dan $\alpha < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Hasil Uji hipotesis variabel peran *nadzir* (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 2,604 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,011, jika dibandingkan dengan t tabel (1,661) maka t hitung > t tabel dan $\alpha < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak, artinya peran *nadzir* berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan *muwakif* (Y).

Hasil ini menunjukkan peran *nadzir* pada pengelolaan wakaf tunai di lembaga *nadzir* mampu meningkatkan kepercayaan *muwakif*, hal ini sejalan dengan penelitian (Kasdi, 2014) yang menyatakan bahwa *nadzir* memiliki peran yang sangat penting dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf tunai, tentunya dalam hal untuk membuat kepercayaan *muwakif* meningkat peran *nadzir* harus senantiasa diperbaiki. Harus terdiri dari orang-orang yang baik, berahlak mulia, amanah, berpengalaman, dan memiliki administrasi yang baik agar *nadzir* mampu menjalankan setiap tugasnya dengan baik sehingga *muwakif* semakin percaya untuk menitipkan wাকafnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel peran *nadzir* (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan *muwakif* (Y) hal ini mendukung penelitian (Tiswarni, 2014) yang menyatakan bahwa begitu pentingnya peran *nadzir* dalam mengelola dan mengoptimalkan wakaf tunai. Dalam hal ini tentunya *nadzir* dituntut untuk memiliki banyak kemampuan dalam mengoptimalkan wakaf tunai, karena kemunduran dan kemajuan wakaf dilihat dari performa *nadzir* yang profesional. *Nadzir* dituntut mampu untuk mengelola dengan cermat terkait dana wakaf tersebut dan mampu melihat investasi yang dapat memberikan keuntungan tinggi serta berada dalam bentuk investasi yang dibolehkan oleh syariat.

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa peran *nadzir* berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan *muwakif* juga mendukung penelitian (Alzaina, 2019) yang menyatakan bahwa peran *nadzir* yang kreatif itu sangat diperlukan, karena apabila *nadzir* dapat lebih kreatif dan produktif, baik dalam hal pengelolaan maupun pengembangan dana wakaf yang telah *muwakif* amanahkan kepadanya sehingga mampu mengelola dengan lebih baik lagi bahkan wakaf mampu menaikkan perekonomian masyarakat dan tentunya membuat kepercayaan *muwakif* semakin meningkat.

5. SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan wakaf tunai dan peran *nadzir* terhadap tingkat kepercayaan *muwakif* di Indonesia. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas pengelolaan wakaf tunai (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan *muwakif* (Y), dengan demikian

untuk meningkatkan kepercayaan muwakif lembaga nadzir harus meningkatkan penyebaran informasi, kejujuran, tepat waktu, sesuai standar etika dan undang-undang, sasaran yang jelas, dan kemudahan akses informasi. sebagai institusi yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak, masalah akuntabilitas adalah suatu keniscayaan dalam pengelolaan wakaf. Oleh karena itu penerapan akuntabilitas haruslah menjadi perhatian bagi semua lembaga nadzir agar mampu meningkatkan kepercayaan muwakif.

2. Peran nadzir (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan muwakif (Y), tentunya dalam hal untuk membuat kepercayaan muwakif meningkat peran nadzir harus senantiasa diperbaiki dalam melakukan tugasnya. Dalam hal ini nadzir harus meningkatkan tanggungjawab penghimpunan dan pengelolaan wakaf tunai, efisiensi program dan anggaran, rasional antara rancangan anggaran dengan program yang akan dilaksanakan. Selain itu, nadzir harus terdiri dari orang-orang yang baik, berahlak mulia, amanah, berpengalaman, dan memiliki administrasi yang baik agar nadzir mampu menjalankan setiap tugasnya dengan baik sehingga muwakif semakin percaya untuk menitipkan wakafnya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Alzaina, N. (2019). Urgensi Pemberdayaan Nadzir Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. *Istismar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 37–42.
- Bayinah, A. N. (2012). Transformasi Paradigma Masyarakat Terhadap Dasar Hukum Wakaf Produktif Di Indonesia. *Jurnal Islamica*, 1(1).
- Budiman, A. A. (2011). Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 75–102.
- Dahlan, D. (2018). Penerapan Good Corporate Governance Pada Nazhir Tunai Yang Terdaftar Di Badan Wakaf Indonesia Studi Kasus Di Tabung Wakaf Indonesia Dan YPI Wakaf AL Azhar. *Liquidity*, 5(2), 95–105. <https://doi.org/10.32546/lq.v5i2.50>
- Elrado H, M., Kumadji, S., & Yulianto, E. (2014). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan, Kepercayaan Dan Loyalitas (Survei Pada Pelanggan Yang Menginap Di Jambuluwuk Batu Resort Kota Batu). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(2), 1–9.
- Fitri, R., & Wilantoro, H. P. (2018). Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 6(1), 41–59. <https://doi.org/10.29244/jam.6.1.41-59>

- Hasrina, C. D., Yusri, Yusri, & Agusti, D. R. (2018). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh. *Jurnal Humaniora: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 2(1), 1–9.
- Ihsan, H., & Ibrahim, S. M. (2011). WAQF accounting and management in Indonesian WAQF institutions: The cases of two WAQF foundations. *Humanomics*, 27(4). <https://doi.org/10.1108/08288661111181305>
- Ihsan, H., Septriani, Y., & Eliyanora. (2016). Akuntabilitas Pada Institusi Wakaf: Studi Kasus Pada Wakaf Daarut Tauhiid. In *National Conference of Applied Sciences, Engineering*. Business and Information Technology.
- Jasfar, F. (2012). Teori dan Aplikasi Sembilan Kunci Keberhasilan Bisnis Jasa: Sumber Daya Manusia, Inovasi, Dan Kepuasan Pelanggan. Jakarta: Salemba empat.
- Kasdi, A. (2014). Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(2).
- Pitchay, A., & Abd Jalil, M. I. (2016). The Constraints Of Malaysian Mutawalli In Developing In Developing Waqf Lands. In *The Muktamar Waqf Iqlimi* (Vol. III, pp. 1–9). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11520.84483>
- Santoso, N. H. (2017). Analisis Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Wakaf Tunai pada Tabung Wakaf Indonesia. IAIN Surakarta.
- Sugara, A., & Dewantara, R. Y. (2017). Analisis Kepercayaan dan Kepuasan Terhadap Penggunaan Sistem Transaksi Jual Beli Online (Studi Pada Konsumen “Z”). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 52(1), 8–15.
- Sugiyono, P. D. (2009). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D (cetakan ke. Bandung: ALFABETA cv.
- Tiswarni. (2014). Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran Dan Wakaf Center). *Al-'Adalah*, 12(2), 409–426.
- Yaacob, H. (2013). Waqf History And Legislation In Malaysia: A Contemporary Perspective. *Journal of Islamic and Human Advanced Research*, 3(6), 387–402.
- Yaacob, H., Petra, S., Sumardi, A., & Nahar, H. S. (2015). Accountability through accounting and reporting lenses lessons from an awqaf institution in a Southeast Asia country. *Humanomics*, 31(3). <https://doi.org/10.1108/H-07-2013-0049>

PEDOMAN PENULISAN

Naskah yang akan dimuat dalam jurnal ini apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Merupakan karya orisinal, bukan plagiat serta belum pernah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah lain.
2. Jumlah halaman berkisar antara 15-25 halaman, tidak termasuk tabel, grafik, dan gambar. Diketik spasi 1,5. Menggunakan Times New Roman Font 12, kertas Ukuran A4. (Tulisan Arab menggunakan *Traditional Arabic*, font 16)
3. Naskah terdiri dari Judul, nama penulis, alamat email, Abstrak, kata kunci, Pendahuluan, Kajian Teori, Metode Penelitian, Pembahasan, dan Kesimpulan.
4. Abstrak berkisar antara 150-200 kata. Tulisan dalam bahasa Indonesia menggunakan abstrak dalam bahasa Inggris. Tulisan berbahasa Inggris dan Arab menggunakan abstrak dalam bahasa Indonesia.
5. Kata kunci, maksimal 4 kata yang mewakili isi tulisan.
6. Kutipan ditulis dengan format APA menggunakan *bodynote*, sedangkan *footnote* (catatan kaki) digunakan apabila dibutuhkan sebagai penjelasan lebih lanjut yang terpisah.
7. Daftar Pustaka disusun alfabetis, yaitu memuat nama penulis, tahun penerbitan, judul buku/majalah/jurnal, kota tempat penerbitan dan nama penerbit.
8. Daftar Pustaka wajib menggunakan manajemen referensi Mendeley.
9. Redaksi berhak melakukan perbaikan tanpa mengubah isi dari tulisan.
10. Naskah yang dikirim akan direview dan hasilnya akan dikategorikan menjadi; diterima tanpa revisi, diterima dengan revisi dan ditolak.
11. Penulis yang Tulisannya dimuat akan mendapatkan Jurnal edisi tersebut. Sedangkan Tulisan yang tidak dimuat akan diberitahukan dan dikembalikan melalui email.
12. Naskah diharapkan telah diterima redaktur selambatnya akhir Februari dan akhir Agustus, melalui register dan submit di sistem OJS [<http://bit.ly/2XpDUKE>]. Naskah yang diterima setelah *deadline* akan dipertimbangkan untuk diterbitkan pada edisi berikutnya.

